



# **RENSTRA**

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### **KOTA BAUBAU**

# **2025-2030**





PEMERINTAH KOTA BAUBAU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raya Palagimata Nomor.... Betoambari Baubau, Sulawesi Tenggara 93721  
Telp. (0402) Fax. (0402) Pos-el: bapendakotabaubau21@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR: 14 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU  
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 13);
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Baubau;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Baubau;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kota Baubau No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
29. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Baubau.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Penyusun (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2025-2029.
- PERTAMA** : Tim Penyusun (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2025-2029. sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas.
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
  3. Melakukan Pengkajian evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun lalu berdasarkan Renstra Bapenda Kota Baubau;
  4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
  5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau
  6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dengan arah rencana pembangunan Kota Baubau;
  7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dari target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
  8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
  9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Tim Penyusun (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2025-2029 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini

- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di: Kota Baubau,  
Tanggal : 05 - 00 - 2025

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BAUBAU,



Drs. MUSRIFL, M.Si.

Pembina Tk. I

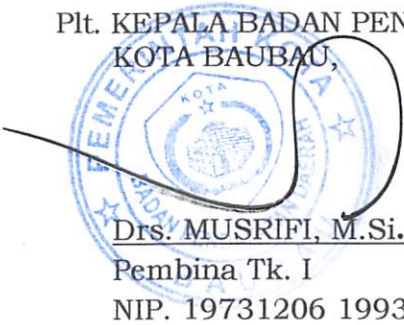
NIP. 19731206 199302 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR : 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA SRATEGIS (RENSTRA) BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2025-2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2025-2029

| NO  | NAMA/NIP                                                  | JABATAN/GOL                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Drs. MUSRIFI, M.Si.<br>19731206 199302 1 001              | Plt. Kepala Badan<br>Pembina Utama Muda, IV/c                                  |
| 2.  | FAUZIA, SP., M.Si.<br>197604192008032002                  | Kepala Bidang Penepatan dan<br>Pengolahan Data<br>Penata Tk. I, III/d          |
| 3.  | MUHAMAD YUSUF, SE., M.Si.<br>19741223 200701 1 011        | Kepala Bidang Penagihan dan<br>Pengendalian<br>Penata Tk. I, III/d             |
| 4.  | NUNARTI, S.IP.<br>19770930 200503 2 003                   | Kepala Bidang Pendataan Dan<br>Pelayanan<br>Penata, III/c                      |
| 5.  | ISMAIL HASAN, S.Kom., M.Si.<br>NIP. 19820905 200903 1 007 | Kepala Sub Bidang Pendataan Dan<br>Penilaian PBB-P2 dan BPHTB<br>Pembina, IV/a |
| 6.  | WA ODE ARNI ACHLAN, S.Sos.<br>19720412 199203 2 011       | Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan<br>Keberatan<br>Pembina, IV/a                 |
| 7.  | SALMATIA, SE.<br>19810814 201001 2 023                    | Kepala Sub Bidang Penetapan dan<br>Verifikasi<br>Penata Tk. I, III/d           |
| 8.  | ROSNIA, SE., M.Si.<br>19820403 201001 1 011               | JFT Perencanaan<br>Penata, III/c                                               |
| 9.  | SYARIFUDDIN. R, S.H., M.Si.<br>19830310 200701 1 005      | Pengelola Data dan Potensi Pajak                                               |
| 10. | SUHARWAN MAULANA ARMIN, S.STP.<br>19960802 201808 1 002   | Analisis Pendapatan Daerah                                                     |
| 11. | LA MUZI, S.IP.<br>19810818 201001 1 021                   | Bendahara Khusus Penerima                                                      |

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BAUBAU,

  
Drs. MUSRIFI, M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731206 199302 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kota Baubau Tahun 2025-2030 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan BAPENDA Kota Baubau selama 5 (Lima) tahun kedepan.

Baubau, 05 Agustus 2025

**Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Baubau**



**Drs. MUSRIFI, M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731206 199302 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                               | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                 | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                                                                           | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                   | 1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....                                                                           | 3          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                                | 6          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                            | 6          |
| <b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH .....</b>                            | <b>8</b>   |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                              | 8          |
| 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                                       | 8          |
| 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....                                                                  | 17         |
| 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                           | 26         |
| 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....                                                                      | 43         |
| 2.2 Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.....                                              | 45         |
| 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....             | 45         |
| 2.2.2. Penentuan Isu-isu strategis.....                                                                   | 53         |
| <b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>                                         | <b>56</b>  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....                                                      | 56         |
| 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....                                             | 60         |
| 3.2.1 Strategi.....                                                                                       | 60         |
| 3.2.2 Arah Kebijakan.....                                                                                 | 63         |
| <b>BAB IV. PROGRAM. KEGIATAN. SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>             | <b>66</b>  |
| 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif..... | 66         |
| 4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....                 | 98         |

|                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... | 99         |
| 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....                     | 99         |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>                                                                                                                    | <b>101</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                      |            |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                             |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Jumlah Jabatan Struktural, Fungsional dan Non ASN Tahun 2025.....                                           | 17 |
| Tabel 2.2  | Tingkat Pendidikan .....                                                                                    | 13 |
| Tabel 2.3  | Daftar Aset Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau..                                                   | 23 |
| Tabel 2.4  | Sistem Pendapatan Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.....                                   | 25 |
| Tabel 2.5  | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Renstra 2024-2026.....               | 26 |
| Tabel 2.6  | Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau Tahun 2019-2024 .....                                        | 29 |
| Tabel 2.7  | Jumlah Wajib Pajak Daerah Kota Baubau Tahun 2023 dan 2024.....                                              | 30 |
| Tabel 2.8  | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau Tahun 2019 – 2024.....                              | 31 |
| Tabel 2.9  | Rata-rata Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d 2024 .....                                                       | 33 |
| Tabel 2.10 | Realisasi Penerimaan PAD dan Pertumbuhannya Tahun 2020-2024 .....                                           | 34 |
| Tabel 2.11 | Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Baubau Tahun 2020-2024.....                                          | 36 |
| Tabel 2.12 | Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Baubau Tahun 2020-2024.....                                      | 37 |
| Tabel 2.13 | Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Baubau Tahun 2020 – 2024.....   | 38 |
| Tabel 2.14 | Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Baubau Tahun 2020 – 2024.....                              | 40 |
| Tabel 2.15 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Renstra Tahun 2024-2026..... | 42 |
| Tabel 2.16 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2020-2024.....         | 43 |
| Tabel 2.17 | Analisis SWOT Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau.....                                           | 47 |
| Tabel 2.18 | Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah.....                                                                | 49 |
| Tabel 2.19 | Isu Strategis Pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030.....                                             | 55 |
| Tabel 3.1  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2030.....                 | 60 |

|           |                                                                                                                                                 |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.2 | Penahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2026-2030.....                                                     | 60  |
| Tabel 3.3 | Strategi Pengelolaan PAD dan Matriks SWOT.....                                                                                                  | 62  |
| Tabel 3.4 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.....                                                               | 63  |
| Tabel 3.5 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....                                                                                              | 64  |
| Tabel 4.1 | Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2030.....                                | 70  |
| Tabel 4.2 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2030.....                                | 79  |
| Tabel 4.3 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2030.....                        | 95  |
| Tabel 4.4 | Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2030 melalui IKU Perangkat Daerah..... | 99  |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2030.....                                                                | 100 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                       |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1  | Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.....                                          | 16 |
| Gambar 2.2  | Grafik Pegawai berdasarkan Jabatan Lingkup Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.....                    | 19 |
| Gambar 2.3  | Grafik ASN berdasarkan Golongan Lingkup Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.....                       | 19 |
| Gambar 2.4  | Grafik Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Lingkup Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.....         | 21 |
| Gambar 2.5  | Grafik Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Lingkup Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.....              | 22 |
| Gambar 2.6  | Pie Chat Rata-rata Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d 2024.....                                         | 35 |
| Gambar 2.7  | Kurva Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 s.d 2024.....                                      | 36 |
| Gambar 2.8  | Kurva Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 s.d 2024.....                                  | 38 |
| Gambar 2.9  | Kurva Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 s.d 2024..... | 39 |
| Gambar 2.10 | Kurva Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 s.d 2024.....                            | 40 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era otonomi daerah dan masa reformasi di Indonesia, menumbuhkan banyak harapan dan tuntutan kepada pemerintah terhadap perbaikan dalam pelayanan publik. Masyarakat menyadari bahwa, pelayanan yang maksimal yang diberikan oleh pemerintah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga *Good Governance* yang diharapkan dapat terwujud. Pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi krisis kepercayaan kepada Pemerintah secara luas yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat dengan melakukan protes kepada pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memiliki 4 (empat) tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi

masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 (dua belas) kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan terutama dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sementara itu Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara hirarki, dasar hukum penyusunan RPJMD, secara umum diatur dalam UU No. 25 Tahun 2005 tentang SPPN dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih teknis diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih spesifik teknis operasional penyusunan RPJMD periode 2025-2029, termasuk bagi Kota Baubau diatur dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Ketentuan regulasi tersebut memberi penegasan tentang posisi strategis dan pentingnya kedudukan RPJMD. Memiliki keterkaitan dua arah, yakni keterkaitan ke atas dan keterkaitan ke bawah, baik dalam lingkungan internal daerah maupun lingkungan eksternal daerah. Secara internal, selain penjabaran dan penguatan terhadap RPJPD Kota Baubau Periode 2025-2045 beserta RTRW periode berjalan, RPJMD juga memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen rencana di bawahnya, khususnya Renstra PD dalam durasi lima tahunan dan RKPD dalam durasi satu tahunan selama periode 2025-2029

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau 2025 - 2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029 dan merupakan dokumen publik yang memiliki peran strategis dalam menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025 – 2030, didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Baubau

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau;
20. Peraturan Daerah Kota Baubau No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah untuk memberikan gambaran dan arah pelaksanaan RPJMD pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan selama 5 (Lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
2. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renstra ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Penentuan Isu-isu strategis

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pendapatan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana sebelumnya sebagai SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah pecah menjadi 2 (dua) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau dan Peraturan Walikota Baubau Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Kemudian diubah pada Peraturan Walikota Baubau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Dan pada Tahun 2025 terdapat perubahan nomenklatur kembali dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Baubau Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah maka Bapenda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah.

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan
3. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. Sekretariat, membawahi Sub bagian umum dan keuangan;
  - b. Bidang Pendapatan Wilayah I terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Wilayah I.
    - 2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I.
  - c. Bidang Pendapatan Wilayah II terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Wilayah II.
    - 2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengembangan terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan.
    - 2) Sub Bidang Koordinasi, Kerjasama dan Pengembangan.
  - e. Jabatan Fungsional
  - f. Jabatan Pelaksana.

#### **A. Kepala Badan**

Tugas Badan Pendapatan Daerah membantu Wali Kota dalam Perencanaan, Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan program strategis serta koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang keuangan, serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan, kantor, tata usaha, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan dan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
2. Penyusunan rencana dan program kerja Badan;
3. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data, Penagihan dan Pengendalian;
5. Pengelolaan Kesekretariatan, Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data, Penagihan dan Pengendalian;
6. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan badan;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian umum dan bertugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, kapasitas pegawai dan administrasi kepegawaian serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

### **C. Bidang Pendapatan Wilayah I**

Bidang Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan, serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemungutan PAD yang dikelolanya;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
- d. menyusun laporan pemungutan pajak dan retribusi secara berkala.

Bidang Pendapatan Wilayah I mengelola pendapatan yang meliputi:

- a. Pajak PBB-P2.
- b. BPHTB.
- c. Pajak Reklame.
- d. Pajak Sarang Burung Walet.
- e. Pajak MBLB.
- f. Opsen PKB.
- g. Opsen BBNKB.

Bidang Pendapatan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Wilayah I;
- b. Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I; dan

c. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Bidang Pendapatan Wilayah I dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
- b. penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan objek retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi yang dikelolanya;
- d. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak dan retribusi;
- e. pengarahan dan penertiban pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
- f. pelaksanaan verifikasi terhadap pendataan, perhitungan dan penetapan pajak yang terutang; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**D. Bidang Pendapatan Wilayah II**

Bidang Pendapatan Wilayah II, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemungutan PAD yang dikelolanya;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya; dan
- d. menyusun laporan pemungutan pajak daerah dan retribusi secara berkala;

Bidang Pendapatan Wilayah II mengelola pendapatan yang meliputi:

a. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yaitu:

1. Makanan dan/atau Minuman,
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan

b. Pajak Air Tanah

c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Bidang Pendapatan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Wilayah II;
- b. Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendapatan Wilayah II dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
- b. penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelolanya;
- d. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak dan retribusi daerah;
- e. pengarahan dan penertiban pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
- f. pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

### **E. Bidang Pengawasan dan Pengembangan**

Bidang Pengawasan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama serta pemeriksaan pajak;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama serta pemeriksaan pajak;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama serta pemeriksaan pajak; dan
- d. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama serta pemeriksaan pajak secara berkala.

Bidang Pengawasan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. perumusan bahan kebijakan, penelaahan, pengumpulan dalam pelaksanaan pengawasan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;

- e. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **F. Jabatan Fungsional**

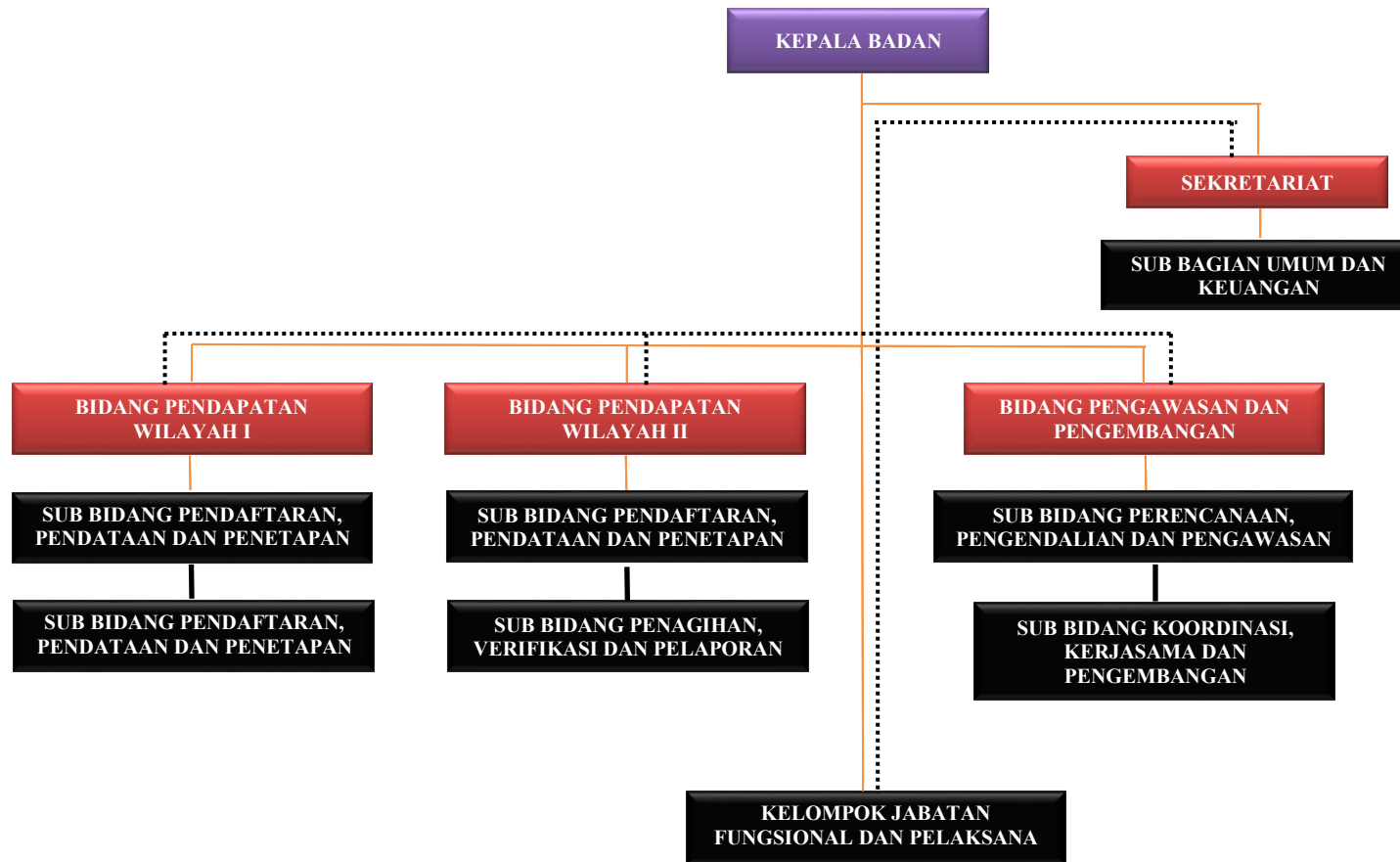
Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional pada Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Fungsional Perencana.
- b. Fungsional Penyuluh Pajak Daerah.
- c. Fungsional Pemeriksa Pajak Daerah.

#### **G. Struktur Organisasi**

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau sesuai Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2025.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau**



## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025 per bulan Agustus Badan Pendapatan daerah Kota Baubau mempunyai pegawai ASN sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dan didukung oleh pegawai Non ASN sebanyak 79 (Tujuh puluh sembilan) orang dengan total pegawai sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah perlu didukung oleh personil atau SDM yang berkualitas dan handal. Pegawai ASN sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang tersebut merupakan pegawai tetap yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional dan terdapat 79 (Tujuh puluh sembilan) orang sebagai PTT Petugas Lapangan dan Administrasi dengan Surat Keputusan Wali Kota termasuk Cleaning Servis dan Supir Kepala Badan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Jabatan Struktural, Fungsional dan Non ASN**  
**Tahun 2025**

| No        | Jabatan                    | Eselon | Gol   | Jumlah    |
|-----------|----------------------------|--------|-------|-----------|
| <b>A.</b> | <b>PEGAWAI ASN</b>         |        |       | <b>33</b> |
| 1         | Struktural                 |        |       | <b>11</b> |
|           | Kepala Badan               | II.b   | IV/c  | -         |
|           | Sekretaris                 | III.a  | IV/a  | 1         |
|           | Kepala Bidang              | III.b  | III/d | 2         |
|           | Kepala Bidang              | III.b  | III/c | 1         |
|           | Kepala Sub Bidang          | IV.a   | IV/a  | 3         |
|           | Kepala Sub Bidang          | IV.a   | III/d | 3         |
|           | Kepala Sub Bagian          | IV.a   | III/c | 1         |
| 2         | <b>Fungsional Tertentu</b> |        |       | <b>3</b>  |
|           | Penyuluh Pajak             | IV.a   | III/d | 1         |
|           | Pemeriksa Pajak            | IV.a   | III/d | 1         |

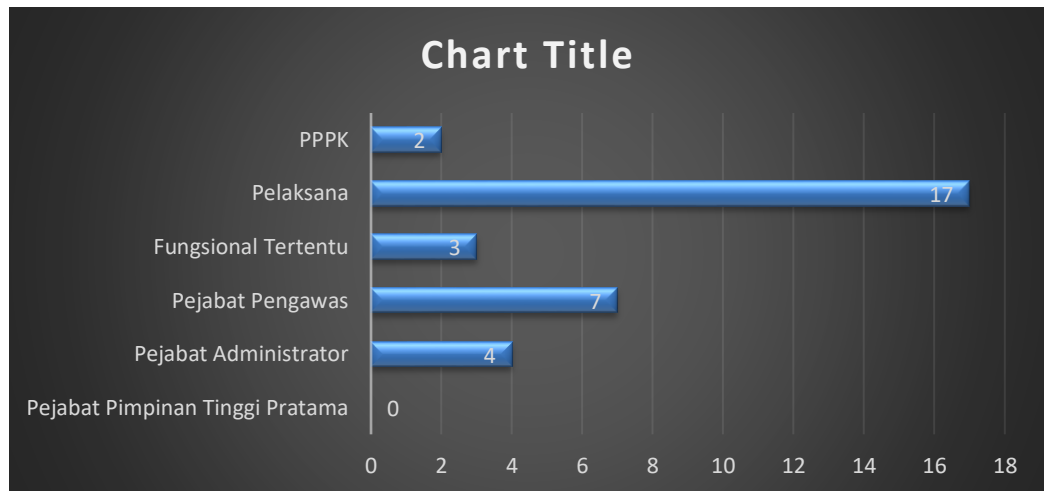
| No | Jabatan                                                                                           | Eselon    | Gol   | Jumlah     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
|    | Perencana                                                                                         | IV.a      | III/c | 1          |
| 3  | Pelaksana                                                                                         |           |       | 19         |
|    | Calon Penilai PBB-P2 Sub Bidang Pendataan dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB                          | Pelaksana | III/d | 1          |
|    | Analisis Pajak Retribusi Daerah Sub Bidang penagihan dan Penindakan                               | Pelaksana | III/c | 1          |
|    | Analisis Pajak Retribusi Daerah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB               | Pelaksana | III/c | 1          |
|    | Pengolah Data dan Potensi Pajak Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi                               | Pelaksana | III/b | 1          |
|    | Analisis Pendapatan Daerah sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan                                    | Pelaksana | III/b | 1          |
|    | Pengolah Data dan Potensi Pajak Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi                               | Pelaksana | III/b | 1          |
|    | Analisis Pajak Retribusi Daerah Sub Bidang Pendataan Pajak Lainnya                                | Pelaksana | III/a | 1          |
|    | Bendahara Barang                                                                                  | Pelaksana | III/a | 1          |
|    | Bendahara Penerima                                                                                | Pelaksana | III/a | 1          |
|    | Pengolah Data Penagihan Pajak Sub Bidang Penagihan dan Penindakan                                 | Pelaksana | III/a | 1          |
|    | Bendahara Pengeluaran                                                                             | Pelaksana | III/a | 1          |
|    | Pengurus Benda Berharga                                                                           | Pelaksana | III/a | 1          |
|    | Pengadministrasi Umum Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB                         | Pelaksana | II/d  | 1          |
|    | Pengadministrasi Umum Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan                                         | Pelaksana | II/d  | 1          |
|    | Pengadministrasi Umum Sub Bidang Pengolahan Data                                                  | Pelaksana | II/c  | 1          |
|    | Pengolah Data dan Potensi Pajak Sub Bidang Pengolahan Data                                        | Pelaksana | II/c  | 1          |
|    | Pengadministrasi Umum Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB                         | Pelaksana | II/c  | 1          |
|    | Penata Layanan Operasional                                                                        | PPPK      | XI    | 1          |
|    | Pengadministrasi Umum                                                                             | PPPK      | VII   | 1          |
| B. | <b>PEGAWAI NON ASN</b>                                                                            |           |       | <b>77</b>  |
| 1  | Bidang Pendapatan Wilayah I, Bidang Pendapatan Wilayah II, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan | PTT       | -     | 74         |
| 2  | Petugas Kebersihan Kantor                                                                         | PTT       | -     | 2          |
| 3  | Supir Kepala Badan                                                                                | PTT       | -     | 1          |
|    | <b>Grand Total Pegawai Bapenda</b>                                                                |           |       | <b>110</b> |

Sumber: Data Pegawai Bapenda Agustus 2025

Guna menunjang proses pendataan, pelayanan, penagihan dan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan untuk kelancaran proses pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka diperlukan tambahan Pegawai dari Pegawai Tidak Tetap atau

Non ASN yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Baubau dan Surat Keputusan Kepala Badan bagi Cleaning Servis dan Supir.

**Gambar 2.2**  
**Grafik Pegawai berdasarkan Jabatan**  
**Lingkup Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**



Sumber: Data Pegawai Bapenda Agustus 2025

**Gambar 2.3**  
**Grafik ASN berdasarkan Golongan**  
**Lingkup Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**



Sumber: Data Pegawai Bapenda Agustus 2025

Sesuai dengan Golongan Ruangnya ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau terbagi atas:

- a. Golongan IV/b sebanyak 1 orang yaitu Sekretaris (3,0%).
- b. Golongan IV/a sebanyak 3 orang sebagai Kepala Sub Bidang (9,1%).
- c. Golongan III/d sebanyak 2 orang sebagai Kepala Bidang (6,1%), sebagai Kepala Sub Bidang sebanyak 3 orang (9,1%), sebanyak 2 Orang sebagai Fungsional (6,1%), dan Pelaksana 1 orang (3,0%).
- d. Golongan III/c sebanyak 1 orang sebagai Kepala Sub Bagian (3,0%), Fungsional sebanyak 1 orang (3,0%), Pelaksana sebanyak 2 orang (6,1%)
- e. Golongan III/b sebanyak 3 orang sebagai Pelaksana (9,1%).
- f. Golongan III/a sebanyak 6 orang sebagai Pelaksana (18,2%).
- g. Golongan II/d sebanyak 2 orang sebagai Pelaksana (6,1%).
- h. Golongan II/c sebanyak 3 orang sebagai Pelaksana (9,1%).
- i. PPPK Penuh Waktu Golongan IX dan Golongan VII masing-masing 1 orang (3,0%).

Adapun pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau menurut pendidikannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai ASN dan Non ASN**  
**Tahun 2025**

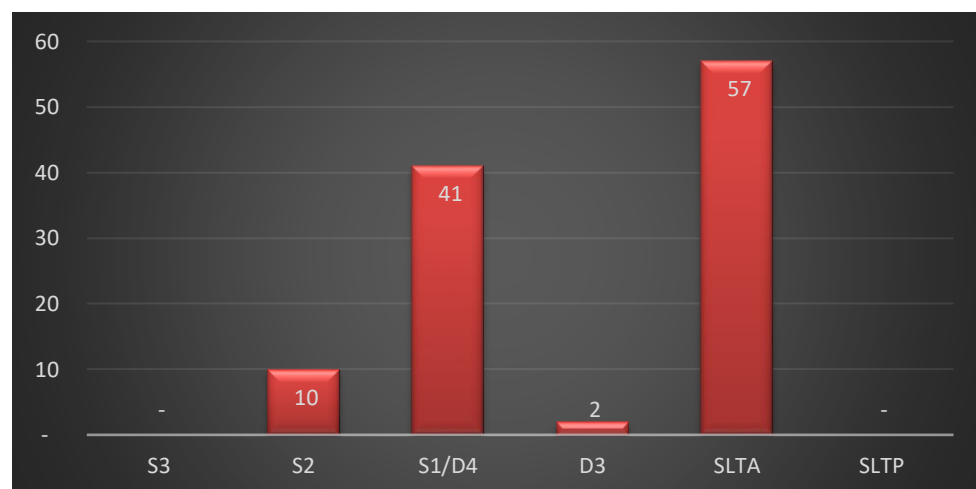
| No                | Pendidikan                 | Jumlah    |
|-------------------|----------------------------|-----------|
| <b>ASN</b>        |                            | <b>33</b> |
| 1                 | Doktor (S3)                | -         |
| 2                 | Strata 2 (S2)              | 8         |
| 3                 | Strata 1 (S1)/Diploma (D4) | 18        |
| 4                 | Diploma (D3)               | 0         |
| 5                 | SLTA                       | 7         |
| <b>Jumlah ASN</b> |                            | <b>33</b> |
| <b>Non ASN</b>    |                            | <b>77</b> |
| 1                 | Doktor (S3)                | -         |

| No                   | Pendidikan                 | Jumlah     |
|----------------------|----------------------------|------------|
| 2                    | Strata 2 (S2)              | 2          |
| 3                    | Strata 1 (S1)/Diploma (D4) | 23         |
| 4                    | Diploma (D3)               | 2          |
| 5                    | SLTA                       | 50         |
| <b>Total Pegawai</b> |                            | <b>110</b> |

Sumber: Data Pegawai Bapenda Agustus 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau paling banyak berpendidikan SLTA sebanyak 57 orang (51,8%), berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 41 orang (37,3%), berpendidikan Magister (S2) sebanyak 8 orang (7,3%), dan berpendidikan Sarjana Muda (D3) sebanyak 2 orang (1,8%).

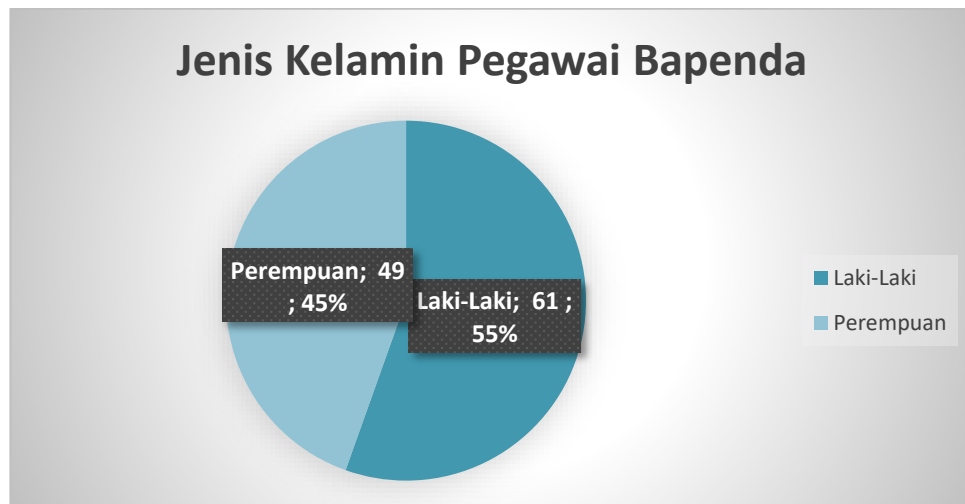
**Gambar 2.4**  
**Grafik Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Lingkup Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**



Sumber: Data Pegawai Bapenda Agustus 2025

Berdasarkan jenis kelaminnya, ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 61 orang (55%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 49 orang (45%).

**Gambar 2.5**  
**Grafik Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Lingkup Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**



Sumber: Data Pegawai Bapenda Agustus 2025

## B. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika: (1) diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau; (2) berupa kas dan setara kas. Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya. Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau juga memiliki aset inventaris sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dan kegiatan kantor lainnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Daftar Aset Tetap**  
**Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025**

| No. | Jenis Barang                                  | Jumlah |
|-----|-----------------------------------------------|--------|
| 1   | A.C. Split                                    | 31     |
| 2   | Alat Kantor Lainnya                           | 3      |
| 3   | Alat Penghancur Kertas                        | 1      |
| 4   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya  | 3      |
| 5   | Alat Ukur                                     | 1      |
| 6   | Bangku Panjang Besi/Metal                     | 6      |
| 7   | Bangku Panjang Kayu                           | 1      |
| 8   | Bangunan Gedung Kantor Permanen               | 2      |
| 9   | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 3      |
| 10  | Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya        | 1      |
| 11  | Bangunan Parkir Terbuka Permanen              | 1      |
| 12  | Bangunan Tempat Parkir                        | 1      |
| 13  | Camera Film                                   | 2      |
| 14  | CCTV - Camera Control Television System       | 2      |
| 15  | Dispenser                                     | 4      |
| 16  | Distometer                                    | 2      |
| 17  | Exhaust Fan                                   | 1      |
| 18  | Filing Cabinet Besi                           | 7      |
| 19  | Gedung Pos Jaga Permanen                      | 3      |

| No. | Jenis Barang                               | Jumlah |
|-----|--------------------------------------------|--------|
| 20  | Genset                                     | 1      |
| 21  | Gordyin/Kray                               | 2      |
| 22  | GPS                                        | 2      |
| 23  | Komputer Jaringan Lainnya                  | 1      |
| 24  | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural         | 68     |
| 25  | Kursi Kerja Pejabat Eselon II              | 1      |
| 26  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III             | 9      |
| 27  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV              | 15     |
| 28  | Laptop                                     | 26     |
| 29  | LCD Projector/Infocus                      | 2      |
| 30  | Lemari Besi/Metal                          | 8      |
| 31  | Lemari Es                                  | 2      |
| 32  | Lemari Kaca                                | 3      |
| 33  | Lemari Kayu                                | 4      |
| 34  | Locker                                     | 3      |
| 35  | Mainframe (Komputer Jaringan)              | 4      |
| 36  | Meja 1/2 Biro                              | 6      |
| 37  | Meja Kerja Pegawai Non Struktural          | 9      |
| 38  | Meja Kerja Pejabat Eselon II               | 3      |
| 39  | Meja Kerja Pejabat Eselon III              | 2      |
| 40  | Meja Kerja Pejabat Eselon IV               | 4      |
| 41  | Meja Komputer                              | 5      |
| 42  | Meja Pimpong                               | 1      |
| 43  | Meja Rapat                                 | 5      |
| 44  | Meja Resepsionis                           | 3      |
| 45  | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon li | 1      |
| 46  | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner        | 1      |
| 47  | Mesin Penghitung Uang                      | 1      |
| 48  | Meubel Lainnya                             | 1      |
| 49  | Mimbar/Podium                              | 1      |
| 50  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)      | 2      |
| 51  | Note Book                                  | 1      |
| 52  | P.C Unit                                   | 36     |
| 53  | Printer (Peralatan Personal Komputer)      | 33     |
| 54  | Rak Besi                                   | 1      |
| 55  | Rak Piring Aluminium                       | 1      |
| 56  | Scanner (Peralatan Mini Komputer)          | 1      |
| 57  | Scanner (Peralatan Personal Komputer)      | 1      |
| 58  | Sepeda Motor                               | 59     |
| 59  | Serial Printer                             | 3      |

| No. | Jenis Barang                           | Jumlah |
|-----|----------------------------------------|--------|
| 60  | Sofa                                   | 5      |
| 61  | Sound System                           | 1      |
| 62  | Tablet Pc                              | 16     |
| 63  | Tanah untuk Bangunan Kantor Pemerintah | 2      |
| 64  | Televisi                               | 4      |
| 65  | Terali                                 | 3      |
| 66  | Treng Air/Tandon Air                   | 2      |
| 67  | Tripod Camera                          | 2      |
| 68  | Uninterruptible Power Supply (Ups)     | 11     |

Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga mempunyai sistem dalam meningkatnya pendapatan daerah, antara lain sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Sistem Pendapatan Daerah**  
**Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025**

| NO | JENIS SISTEM | FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SIMPAD       | Sistem Informasi Pajak Daerah digunakan untuk:<br>a. Membuat Ketetapan Official Assesment (Pajak Reklame)<br>b. Pembayaran Self Assesment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan)<br>c. Membuat laporan monitoring pendapatan dan kendali wajib pajak |
| 2  | SIMBPHTB     | Sistem Informasi BPHTB digunakan untuk :<br>a. Menerima setoran BPHTB<br>b. Membuat verifikasi BPHTB                                                                                                                                                                     |
| 3  | SIMPBB       | Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk :<br>a. Membuat Ketetapan PBB beserta cetak masalnya<br>b. Membuat dan mengelola pelayanan PBB (perubahan, keberatan, salinan dst)<br>c. Untuk pembayaran dari Wajib Pajak PBB                                  |

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planing), dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan target Kinerja pada RPD Renstra Tahun 2024-2026 Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

**Tabel. 2.5**  
**Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Renstra 2024-2026**

| NO. | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH      | TARGET NSP K | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke |        |        |   |   | Realisasi Capaian Tahun ke- |   |   |   |   | Rasio Capaian pada Tahun ke- |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|--------|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|---|---|---|
|     |                                                                 |              |            |                          | 1                                        | 2      | 3      | 4 | 5 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1   | Derajat Fiscal Otonomi Daerah                                   |              |            |                          | 11,12%                                   | 11,39% | 11,65% |   |   | 13,05%                      |   |   |   |   | 117,39%                      |   |   |   |   |
| 1.1 | Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah                   |              |            |                          | 85%                                      | 87%    | 89%    |   |   | 78,32%                      |   |   |   |   | 92,14%                       |   |   |   |   |
| 1.2 | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah                       |              |            |                          | 85%                                      | 88%    | 91%    |   |   | 82,34%                      |   |   |   |   | 96,87%                       |   |   |   |   |
| 2   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                    |              |            |                          | 61                                       | 65     | 69     |   |   | 72,56                       |   |   |   |   | 118,95%                      |   |   |   |   |
| 2.1 | Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan Program OPD |              |            |                          | 100%                                     | 100%   | 100%   |   |   | 99,11%                      |   |   |   |   | 99,11%                       |   |   |   |   |

Sumber: Laporan Realisasi IKU Bapenda

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi capaian dari target renstra yang direncanakan didukung oleh kinerja OPD pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terutama pada indikator Persentase Capaian pajak dan Retribusi Daerah, namun rasio yang diperoleh hanya sebesar 92,14% hal ini dipengaruhi oleh beberapa jenis retribusi daerah yang tidak tercapai disebabkan beberapa hal seperti:

- a. Target yang ditetapkan tidak memperhatikan potensi yang dapat tertagih.
- b. BPHTB tidak dapat tertagih disebabkan regulasi yang membatasi pemungutannya.
- c. Potensi Pajak Air Tanah dan Sarang burung Walet tidak dapat tertagih disebabkan kurangnya wawasan dan pengetahuan atas tata cara perhitungan tarif 2 (dua) jenis pajak baru tersebut.
- d. Potensi Retribusi Rusunawa dan Retribusi Penyewaan Alat Berat perlu pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Potensi pada Retribusi Parkir tidak dapat dikelola dengan baik.
- f. Secara menyeluruh pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum maksimal dilakukan oleh OPD pemungut PAD.

#### **A. Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah**

Struktur APBD Kota Baubau terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, struktur APBD terfokus pada capaian Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

- 2) Pendapatan Transfer Kota Baubau terdiri dari beberapa komponen diantaranya:
  1. Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
  2. Transfer Pemerintah Pusat yang lainnya : Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian,
  3. Transfer Pemerintah Provinsi : Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (bantuan keuangan propinsi/pemda lainnya).
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya

Capaian tersebut merupakan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dari 12 organisasi Pengelola Pendapatan Asli Daerah di Kota Baubau yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Dinas Kesehatan - BLUD-RSUD
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Pertanian
10. Dinas Perikanan
11. Dinas Pariwisata
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kinerja OPD Pengelola PAD akan mempengaruhi capaian atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, maka

fungsi pengawasan dan monitoring secara berkala harus dilakukan bersama-sama OPD terkait.

PAD memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 11,95% selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 oleh karena itu Pemerintah Kota Baubau melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD perlu mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan asli daerah terutama pada Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan PAD Kota Baubau**  
**Tahun 2019-2024**

| Tahun                  | Realisasi              | Pertumbuhan           | %            |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 2019                   | 85.974.054.016         | 24.652.143.023        | 40,20        |
| 2020                   | 87.008.913.500         | 1.034.859.484         | 1,20         |
| 2021                   | 103.754.545.119        | 16.745.631.619        | 19,25        |
| 2022                   | 107.053.046.908        | 3.298.501.789         | 3,18         |
| 2023                   | 103.131.261.338        | (3.921.785.570)       | -3,66        |
| 2024                   | 128.084.807.145        | 24.953.545.807        | 24,20        |
| <b>Total Rata-rata</b> | <b>123.001.325.605</b> | <b>13.352.579.230</b> | <b>16,87</b> |

Sumber: LRA Kota Baubau 2019 - 2024

Pertumbuhan PAD ini perlu ditingkatkan lagi termasuk pada Komponen PAD retribusi daerah. Pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan PAD, dikarenakan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern mencakup komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aturan pemungutan Retribusi Daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau sebagai koordinator bagi OPD Penghasil Retribusi maka perlu ditingkatkan koordinasi dengan OPD-OPD dalam hal penentuan target retribusi masing-masing OPD Penghasil Retribusi.

Di Kota Baubau Pajak Daerah memiliki beberapa jenis. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah Kota Baubau sebagai fungsi pengelolaan pendapatan. Adapun jenis Pajak Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
3. Pajak Sarang Burung Walet
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. PBJT – Makanan dan Minuman
7. PBJT – Tenaga Listrik
8. PBJT – Jasa Perhotelan
9. PBJT – Jasa Parkir
10. PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
12. Opsen PKB
13. Opsen BBNKB

Jumlah Wajib Pajak Daerah Kota Baubau Tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Wajib Pajak Daerah Kota Baubau**  
**Tahun 2023 dan 2024**

| NO | JENIS PAJAK DAERAH | JUMLAH WAJIB PAJAK (WP/WR) | JUMLAH WAJIB PAJAK (WP/WR) |
|----|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Pajak Hotel        | 62                         | 68                         |
| 2  | Pajak Rumah Kos    | 162                        | -                          |

| NO | JENIS PAJAK DAERAH                                | JUMLAH<br>WAJIB PAJAK<br>(WP/WR) | JUMLAH<br>WAJIB PAJAK<br>(WP/WR) |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3  | Pajak Restoran                                    | 196                              | 248                              |
| 4  | Pajak Hiburan                                     | 25                               | 37                               |
| 5  | Pajak Reklame                                     | 924                              | 970                              |
| 6  | Pajak Penerangan Jalan                            | 1                                | 1                                |
| 7  | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan              | 29                               | 30                               |
| 8  | Pajak Parkir                                      | 3                                | 3                                |
| 9  | PBB-P2                                            | 51.953                           | 46309                            |
| 10 | Pajak BPHTB                                       | 1436                             | 1347                             |
| 11 | Pajak Air Tanah                                   | 76                               | 76                               |
| 12 | Pajak Sarang Burung Walet                         | 9                                | 9                                |
| 13 | Retribusi Jasa Usaha Pemakaian<br>Kekayaan Daerah | 644                              | 644                              |

Adapun capaian realisasi atas target Pendapatan Asli Daerah terhadap target pada APBD Perubahan tahun 2019-2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Baubau Tahun 2019-2024**

| Tahun       | Target PAD             | Realisasi PAD          | Bertambah/<br>(Berkurang) | %      |
|-------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| <b>2020</b> | 102.808.041.270        | 87.011.274.772         | (15.796.766.498)          | 84,63  |
| <b>2021</b> | 111.775.067.051        | 95.566.805.178         | (16.208.261.873)          | 85,50  |
| <b>2022</b> | 114.485.468.979        | 107.048.315.216        | (7.437.153.763)           | 93,50  |
| <b>2023</b> | 119.993.283.279        | 103.131.261.338        | (16.862.021.941)          | 85,95  |
| <b>2024</b> | 125.410.033.202        | 128.084.807.145        | 2.674.773.943             | 102,13 |
| Rata-Rata   | <b>114.894.378.756</b> | <b>104.168.492.730</b> | <b>(10.725.886.026)</b>   | 90,66  |

Sumber: LRA Kota Baubau, 2020-2024

Pada tabel di atas, terlihat realisasi pendapatan asli daerah Kota Baubau tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu tidak terealisasi sesuai dengan nilai target yang ditetapkan pada APBD, hal ini perlu dikaji kembali data potensi atas pajak dan retribusi daerah sehingga penentuan target tidak berdasarkan perkiraan tapi sesuai dengan potensi yang ada di

lapangan. Oleh karena itu pula pentingnya dukungan pendanaan pada OPD pengelola Pendapatan Asli Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang peningkatan pendapatan asli daerah terutama pada Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rencana pembangunan di Kota Baubau tidak akan direalisasikan tanpa dukungan dari kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan dari struktur anggaran, pendapatan daerah yang berasal dari pos pendapatan asli daerah memiliki korelasi. Semakin besar proporsi pendapatan asli daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut.

**Tabel 2.9**  
**Rata-rata Kontribusi Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2020 s.d 2024**

| Uraian                               | 2020                      | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   | Rata-rata Kontribusi (%) |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah               | 87.011.274.771,75         | 95.566.805.178,00      | 107.048.315.216        | 103.131.261.338        | 128.084.807.145        | 11,69                    |
| Pendapatan Transfer                  | 729.524.480.698,00        | 727.998.731.640,00     | 759.145.125.644        | 800.423.323.591        | 807.311.615.239        | 85,82                    |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 28.273.382.233,00         | 36.835.111.691,00      | 25.880.775.058         | 9.570.402.011          | 10.282.563.923         | 2,49                     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>844.809.137.702,75</b> | <b>860.400.648.509</b> | <b>892.074.215.918</b> | <b>913.124.986.940</b> | <b>945.678.986.307</b> | <b>100</b>               |

Sumber: LRA Kota Baubau 2020-2024

Pada tabel di atas nampak bahwa pendapatan daerah Kota Baubau berfluktuasi setiap tahunnya, namun pada Pendapatan Asli Daerah meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadi sesuatu yang harus ditingkatkan lagi terkait data potensi pajak dan retribusi daerah. Adapun persentase rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah sebesar 11,69%, rata-rata kontribusi Pendapatan Transfer tetap yang paling besar yaitu 85,82% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkontribusi rata-rata sebesar 2,49%.

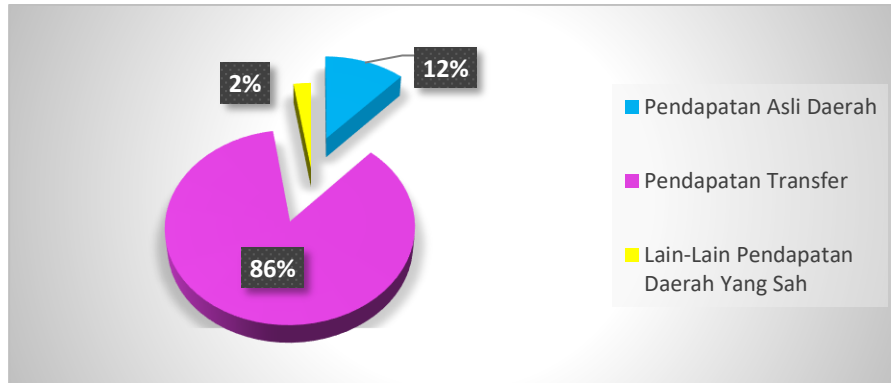
Pendapatan Daerah Kota Baubau mengalami fluktuasi tren peningkatan setiap tahunnya. Pada bagian ini ditampilkan capaian realisasi PAD dan pertumbuhannya selama 5 (Lima) tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.10**  
**Realisasi Penerimaan PAD dan Pertumbuhannya**  
**Tahun 2020 - 2024**

| Uraian                   | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Penerimaan PAD Per Tahun | 87.008.913.500 | 103.754.545.119 | 107.053.046.908 | 103.131.261.338 | 128.084.807.145 |
| Pertumbuhan PAD          | 1.034.859.484  | 16.745.631.619  | 3.820.170.651   | (3.917.053.878) | 24.953.545.807  |

Sumber: LRA Kota Baubau, 2020 - 2024

**Gambar 2.6**  
**Pie Chat rata-rata Pendapatan Daerah Kota Baubau**  
**Tahun 2020 s.d 2024**



Jika melihat dari gambar 2.5, maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau baru menyumbang rata-rata sebesar 11,69% atau 12% terhadap total pendapatan daerah Kota Baubau. Kontribusi pendapatan terbesar justru berasal dari dana perimbangan yang ternyata mampu menyumbang sebesar 85,82% atau 86%. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi hanya 2,49%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Baubau belum sepenuhnya mandiri dalam mendanai pembangunannya, dimana ketergantungan Pemerintah Kota Baubau terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih cukup tinggi.

Untuk itu, diperlukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD guna meningkatkan pendapatan daerah Kota Baubau seperti dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Perlu juga upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari retribusi daerah, seperti retribusi parkir pada pasar-pasar Kota Baubau ataupun tempat-tempat wisata.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

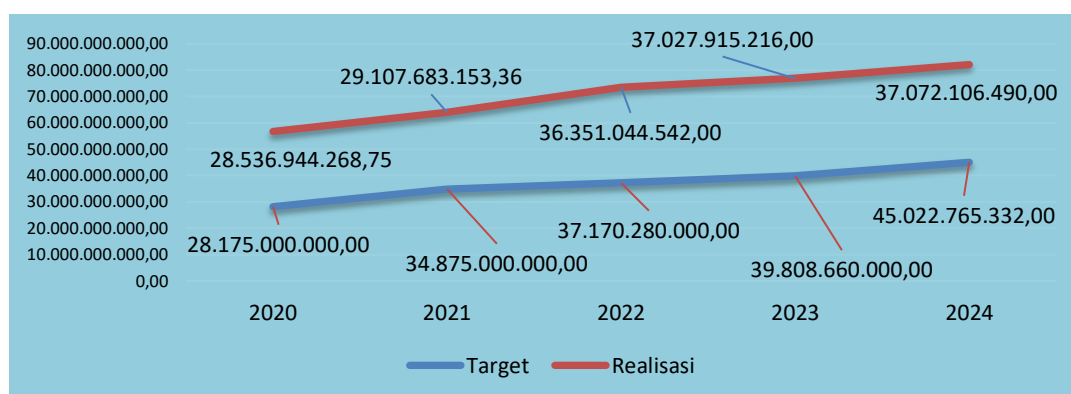
**Tabel 2.11**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah**  
**Kota Baubau Tahun 2020 – 2024**

| Tahun            | Target                   | Realisasi                | Kelebihan/<br>Kekurangan | %            |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 2020             | 28.175.000.000,00        | 28.536.944.268,75        | 361.944.269              | 101,28       |
| 2021             | 34.875.000.000,00        | 29.107.683.153,36        | (5.767.316.847)          | 83,46        |
| 2022             | 37.170.280.000,00        | 36.351.044.542,00        | (819.235.458)            | 97,80        |
| 2023             | 39.808.660.000,00        | 37.027.915.216,00        | (2.780.744.784)          | 93,01        |
| 2024             | 45.022.765.332,00        | 37.072.106.490,00        | (7.950.658.842)          | 82,34        |
| <b>Rata-rata</b> | <b>37.010.341.066,40</b> | <b>33.619.138.734,02</b> | <b>(3.391.202.332)</b>   | <b>90,84</b> |

Sumber: LRA Kota Baubau, 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata capaian 90,84%. Namun masih perlu langkah-langkah konkrit untuk dapat mencapai target setiap tahunnya.

**Gambar 2.7**  
**Kurva Target dan Realisasi Pajak Daerah**  
**Tahun 2020 – 2024**



Pada Gambar 2.6 terlihat bahwa realisasi atas target pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan yang positif setiap tahun dari nilai 28 milyar meningkat hingga 37 milyar rupiah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pada tabel 2.11 terlihat bahwa realisasi atas target pendapatan retribusi daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan persentase 159,15% namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan memperhatikan potensi-potensi retribusi daerah yang belum terdata dan terdaftar.

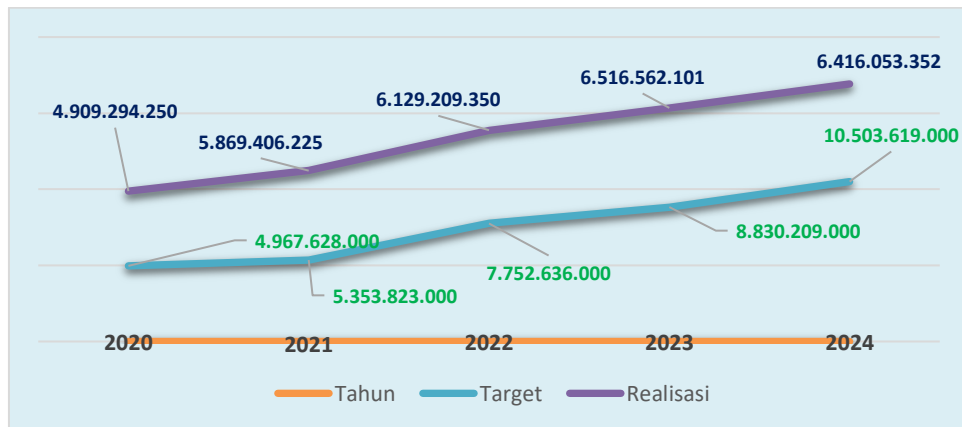
**Tabel 2.12**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah**  
**Kota Baubau Tahun 2020 – 2024**

| Tahun     | Target               | Realisasi            | Kelebihan/<br>Kekurangan | %             |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 2020      | 4.967.628.000        | 4.909.294.250        | (58.333.750)             | 98,83%        |
| 2021      | 5.353.823.000        | 5.869.406.225        | 515.583.225              | 109,63%       |
| 2022      | 7.752.636.000        | 6.129.209.350        | (1.623.426.650)          | 79,06%        |
| 2023      | 8.830.209.000        | 6.516.562.101        | (2.313.646.899)          | 73,80%        |
| 2024      | 10.503.619.000       | 6.416.053.352        | (4.087.565.648)          | 61,08%        |
| Rata-rata | <b>7.481.583.000</b> | <b>5.968.105.056</b> | <b>(1.513.477.944)</b>   | <b>79,77%</b> |

**Sumber: LRA Kota Baubau, 2020-2024**

Apabila dituangkan dalam kurva seperti gambar 2.7 target dan realisasi atas retribusi daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024, namun retribusi daerah perlu ditingkatkan kembali terutama potensi-potensi baru Retribusi Daerah di Kota Baubau.

**Gambar 2.8**  
**Kurva Target dan Realisasi Retribusi Daerah**  
**Kota Baubau Tahun 2020 – 2024**



Komponen lain dari PAD adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami Realisasi rata-rata 105.80%. Realisasi PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

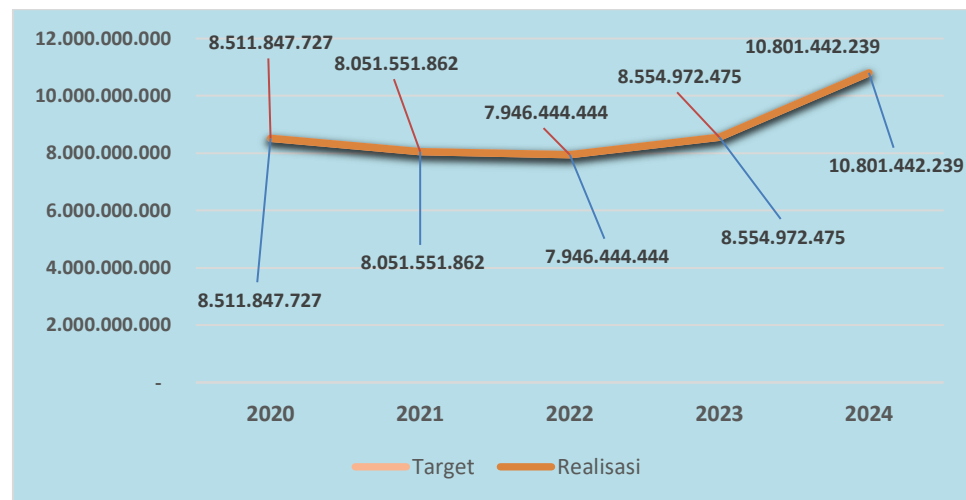
**Tabel 2.13**  
**Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**  
**yang Dipisahkan Kota Baubau Tahun 2020 – 2024**

| Tahun      | Target               | Realisasi            | Kelebihan/<br>Kekurangan | %           |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 2020       | 8.511.847.727        | 8.511.847.727        | -                        | 100%        |
| 2021       | 8.051.551.862        | 8.051.551.862        | -                        | 100%        |
| 2022       | 7.946.444.444        | 7.946.444.444        | -                        | 100%        |
| 2023       | 8.554.972.475        | 8.554.972.475        | -                        | 100%        |
| 2024       | 10.801.442.239       | 10.801.442.239       | -                        | 100%        |
| Rata -rata | <b>8.773.251.749</b> | <b>8.773.251.749</b> | -                        | <b>100%</b> |

Sumber: LRA Kota Baubau, 2020-2024

Berdasarkan gambar 2.8 grafik realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan di tahun 2019 dan 2023 target dan realisasinya tidak nampak signifikan. Pada tahun 2022 dan 2023 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang hanya mencapai 100%.

**Gambar 2.9**  
**Kurva Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Baubau Tahun 2020 – 2024**



Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

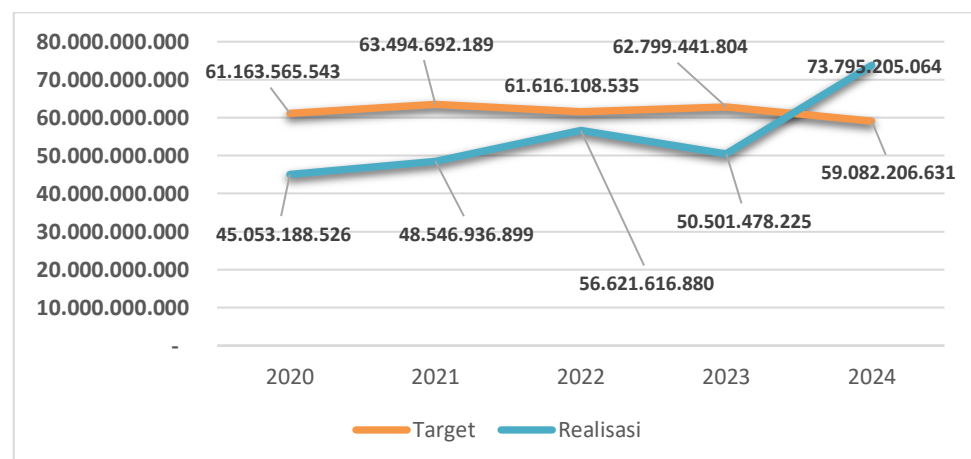
Berdasarkan tabel 2.13 dilihat bahwa rata-rata realisasi atas target lain-lain PAD yang sah sebesar 89,09%. Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 124,90% dan komponen yang sangat berpengaruh yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Pendapatan BLUD.

**Tabel 2.14**  
**Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**  
**Kota Baubau Tahun 2020 – 2024**

| Tahun            | Target                | Realisasi             | Kelebihan/<br>Kekurangan | %            |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 2020             | 61.163.565.543        | 45.053.188.526        | (16.110.377.017)         | 73,66        |
| 2021             | 63.494.692.189        | 48.546.936.899        | (14.947.755.290)         | 76,46        |
| 2022             | 61.616.108.535        | 56.621.616.880        | (4.994.491.655)          | 91,89        |
| 2023             | 62.799.441.804        | 50.501.478.225        | (12.297.963.579)         | 80,42        |
| 2024             | 59.082.206.631        | 73.795.205.064        | 14.712.998.433           | 124,90       |
| <b>Rata-rata</b> | <b>61.631.202.940</b> | <b>54.903.685.119</b> | <b>(6.727.517.822)</b>   | <b>89,08</b> |

Sumber: LRA Kota Baubau, 2020-2024

**Gambar 2.10**  
**Kurva Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**  
**Kota Baubau Tahun 2020 – 2024**



Rencana pembangunan di Kota Baubau tidak akan direalisasikan tanpa dukungan dari kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan dari struktur anggaran, pendapatan daerah yang berasal dari pos pendapatan asli daerah memiliki korelasi. Semakin besar proporsi pendapatan asli daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut.

## B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sesuai dengan target Renstra RPD Tahun 2024-2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kota Baubau Renstra Tahun 2024-2026**

| URAIAN                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke |                      |                       |   |   | Realisasi Capaian Tahun ke- |   |   |   |   | Rasio Capaian pada Tahun ke- |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|---|---|---|
|                                                             | 1                                        | 2                    | 3                     | 4 | 5 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.576.640.000                            | 6.825.736.000        | 7.295.058.000         |   |   | 5.798.301.529               |   |   |   |   | 88,17%                       |   |   |   |   |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | 2.240.295.000                            | 2.610.000.000        | 3.020.000.000         |   |   | 2.028.820.113               |   |   |   |   | 90,56%                       |   |   |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>8.816.935.000</b>                     | <b>9.435.736.000</b> | <b>10.315.058.000</b> |   |   | <b>7.827.121.642</b>        |   |   |   |   | <b>88,77%</b>                |   |   |   |   |

Sumber: Data Renstra 2024-2026 dan Lakip Bapenda 2024

Selama periode Tahun Anggaran 2020-2024, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Program Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, dijelaskan di tabel 2.14 sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2020-2024**

| Tahun | Uraian    | Program Penunjang | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi (%) |
|-------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2020  | Anggaran  | -                 | 1.355.169.165,00                      |                                         |
|       | Realisasi | -                 | 1.328.703.390,00                      | 98,05%                                  |
| 2021  | Anggaran  | 662.103.800,00    | 871.913.600,00                        |                                         |
|       | Realisasi | 618.853.081,00    | 850.213.550,00                        | 97,51%                                  |
| 2022  | Anggaran  | 7.648.026.976,00  | 2.376.333.789,00                      |                                         |
|       | Realisasi | 6.933.755.873,00  | 2.341.417.577,00                      | 98,53%                                  |
| 2023  | Anggaran  | 7.720.951.873,00  | 2.792.676.435,00                      |                                         |
|       | Realisasi | 7.350.854.171,00  | 2.743.208.207,00                      | 98,23%                                  |
| 2024  | Anggaran  | 6.550.519.793,00  | 2.037.546.500,00                      |                                         |
|       | Realisasi | 5.798.301.529,00  | 2.028.820.113,00                      | 99,57%                                  |
|       |           |                   | <b>Rata-rata Ratio</b>                | <b>98,38%</b>                           |

Sumber: LRA BAPENDA Kota Baubau Tahun 2020-2024

Pada tahun anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau mengelola anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Capaian realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya berada pada kisaran rata-rata 98,38%.

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau memiliki fungsi untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Kelompok sasaran layanan yaitu:

- Wajib Pajak Reklame
- Wajib Pajak Air Tanah
- Wajib Pajak Sarang Burung Walet

- d. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-P2
- e. Wajib Pajak BPHTB
- f. Wajib Pajak PBJT-Makanan dan Minuman
- g. Wajib Pajak PBJT- Jasa Perhotelan
- h. Wajib Pajak PBJT- Tenaga Listrik
- i. Wajib Pajak PBJT- Jasa Parkir
- j. Wajib Pajak PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan
- k. Wajib Pajak Opsen PKB
- l. Wajib Pajak Opsen BBNKB

Selain itu selain sebagai koordinator PAD Kelompok Sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah:

- a. Badan Pendapatan Daerah
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- c. Dinas Kesehatan - BLUD-RSUD
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- f. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- g. Dinas Lingkungan Hidup
- h. Dinas Perhubungan
- i. Dinas Pertanian
- j. Dinas Perikanan
- k. Dinas Pariwisata
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mitra dalam pemberian layanan terdiri dari:

- a. Badan Pertanahan Nasional
- b. Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- d. Kejaksaan Negeri
- e. PT. Pembayaran Lintas utama Sukses (Pembayaran Indomaret)

- f. PT. Data Cell Infomedia (Pembayaran Sipanda)
- g. PT. Pos Indonesia (Pembayaran PBB\_P2 dan BPHTB)

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah:

- a. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Baubau sebagai unsur BUMN menyepakati pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan pembayaran rekening listrik serta penyelenggaraan penerangan jalan umum Pemerintah Kota Baubau
- b. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) sebagai unsur BUMD melakukan pembukaan Rekening Penampungan pembayaran Pajak Daerah.
- c. PT. Bank Negara Indonesia sebagai unsur BUMD melakukan pembukaan Rekening Penampungan pembayaran Pajak Daerah.

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

Badan pendapatan daerah Kota Baubau memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang pengelolaan pendapatan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang

Pengelolaan Pendapatan Daerah. Bapenda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah. Namun sampai saat ini masih banyak faktor-faktor kekurangan dan hambatan-hambatan dalam pengelolaan pendapatan daerah terutama dalam pelayanan berbasis digitalisasi sehingga biaya dan waktu dapat diminimalisir dalam pencapaian target pendapatan daerah.

Berikut tabel analisis SWOT pada pengelolaan pendapatan daerah:

**Tabel 2.17**  
**Analisis SWOT**  
**Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau**

| <b>KEKUATAN (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>KELEMAHAN (W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi yang jelas disusun sesuai dengan UU HKPD.</li> <li>2. Bertambahnya potensi pajak dan retribusi daerah berbagai sektor.</li> <li>3. Pengelolaan anggaran yang efektif dalam melaksanakan pelayanan.</li> <li>4. Sistem informasi pajak daerah yang mulai berkembang (SIMPBB, SIMPAD, SIMBPHTB)</li> <li>5. Dukungan dari Kepala Daerah, BUMD dan pihak ketiga dalam peningkatan PAD.</li> <li>6. Adanya OPD Bapenda sebagai OPD yang fokus meningkatkan PAD.</li> </ol>                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis data obyek dan subyek pajak belum lengkap/terintegrasi.</li> <li>2. Struktur Organisasi belum memaksimalkan kinerja organisasi.</li> <li>3. SDM yang terbatas kompetensi dan profesionalismenya.</li> <li>4. Kepatuhan wajib pajak/wajib retribusi masih rendah.</li> <li>5. Infrastruktur IT terbatas dan belum terintegrasi by NIK dan Pemungutan PAD masih belum semua terdigitalisasi/online.</li> <li>6. Aset Pemda belum optimal sebagai Passive income</li> </ol> |
| <b>PELUANG (O)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ANCAMAN (T)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) memberi ruang optimalisasi PAD.</li> <li>2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah.</li> <li>3. Digitalisasi dan elektronifikasi pelayanan pajak dan retribusi daerah (Qris dan pembayaran online).</li> <li>4. Kerjasama dengan pihak ketiga BUMD/Swasta/LSM dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>5. Reformasi Birokrasi dan e-government.</li> <li>6. Pertumbuhan ekonomi lokal yang meningkat (Pariwisata, Perdagangan, Pelayanan jasa).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan regulasi pusat yang membatasi kewenangan fiskal daerah.</li> <li>2. Keberatan masyarakat terhadap pungutan baru dan peningkatan tarif.</li> <li>3. Resiko kebocoran dan korupsi.</li> <li>4. Kondisi ekonomi nasional yang tidak menentu</li> <li>5. Ketergantungan yang tinggi pada Dana Transfer</li> <li>6. Tumpang tindih kewenangan dengan instansi pusat/provinsi.</li> </ol>                                                                                  |

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini adalah sebagai berikut:

**Masalah Internal :**

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.
- Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur (SDM), antara lain Juru Sita, Penilai Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Penilai Aset. Ada beberapa Kualifikasi tenaga yang masih sangat terbatas jumlahnya seperti Penilai Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Penilai Aset, adapun Juru Sita belum ada sampai saat ini.
- Terbatasnya jumlah tenaga dan kemampuan aparaturnya dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah, sehingga potensi pertumbuhan dan obyek pajak daerah belum terdata.
- Belum sempurnanya Data Base potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- Penatausahaan Retribusi belum optimal yang belum dilengkapi dengan Sistem Pendapatan yang memadai dan belum adanya prosedurnya pengelolaan Retribusi yang memadai secara elektronik.
- Kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah secara bersamaan bersama OPD terkait lainnya.

**Masalah Eksternal :**

- Kurangnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan wajib pajak Self Assesment dalam pembayaran pajak atau kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya masih rendah.
- Sistem Administrasi Pajak yang kurang sempurna dan masih besarnya tunggakan pajak daerah, sehingga perlu penegakan disiplin yang ketat, salah satunya dengan penerapan sanksi perpajakan daerah yang tepat.
- Kurangnya pemahaman stakeholder tentang pentingnya PAD sebagai Penerimaan Daerah.

- Belum Optimalnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra kerja lainnya.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPENDA Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Masalah Pokok, Masalah Dan Akar Masalah**

| No. | Masalah Pokok                    | Masalah                                                | Akar Masalah                                                                                                 |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Rendahnya PAD - Pajak Daerah     | Pajak daerah belum optimal                             | Basis data objek dan subjek pajak belum lengkap dan belum terintegrasi.                                      |
|     |                                  |                                                        | Kegiatan pendataan, pengawasan, dan penagihan masih terbatas                                                 |
|     |                                  |                                                        | Tingkat kepatuhan wajib pajak rendah                                                                         |
|     |                                  |                                                        | Belum ada integrasi dengan instansi terkait (Dinas Perizinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dll.) |
| 2   | Rendahnya PAD - Retribusi Daerah | Retribusi daerah tidak sesuai nilai keekonomian        | Basis data objek dan subjek pajak belum lengkap dan belum terintegrasi.                                      |
|     |                                  |                                                        | Sarana dan prasarana retribusi daerah tidak memadai                                                          |
|     |                                  |                                                        | Tingkat kepatuhan wajib retribusi rendah                                                                     |
|     |                                  |                                                        | Proses masih manual, lemahnya pengawasan, serta Sistem pembayaran retribusi daerah belum terdigitalisasi     |
| 3   | PAD Tidak Produktif              | Aset daerah yang menganggur                            | Banyak aset tidak jelas status hukum & tidak produktif                                                       |
| 4   | PAD yang Stagnan                 | Lain-lain PAD tidak berkembang dan tidak dapat terukur | Inovasi pendapatan terbatas dan kerja sama pihak ketiga minim                                                |

| No. | Masalah Pokok        | Masalah                               | Akar Masalah                                                                                   |
|-----|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                       | Ketergantungan pada transfer pusat tinggi dan Proporsi PAD masih kecil dibanding dana transfer |
|     |                      |                                       | Minimnya PAD berbanding terbalik dengan meningkatnya kebutuhan anggaran setiap tahun           |
| 5   | Lemahnya Kelembagaan | Kinerja pengelolaan PAD belum optimal | SDM terbatas, koordinasi antar OPD lemah                                                       |
|     |                      |                                       | Pelatihan minim, rotasi pegawai tinggi, dan belum ada spesialisasi fungsional                  |

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi pengelola pendapatan daerah harus mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal tersebut dibutuhkan guna melihat dan menganalisis sejauh mana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan memahami lingkungan, baik internal maupun eksternal, sebuah organisasi dapat mempelajari kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang pada akhirnya berguna untuk menyusun sebuah rencana meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal.

### A. Tantangan

Pendapatan Daerah sebagai dasar Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, perlu direncanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi pendapatan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- 1) Semakin tingginya kebutuhan Pendapatan Daerah untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, baik

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

- 2) Kurang optimalnya pengawasan pendapatan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 3) Belum optimalnya penggalan data potensi dan sumber-sumber penerimaan asli daerah.
- 4) Belum maksimalnya pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan.
- 5) Masih banyaknya aset daerah yang belum termanfaatkan sebagai aset yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.
- 6) Tingginya tuntutan transparansi informasi publik seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*);
- 7) Tingginya harapan masyarakat kepada pemerintah dalam mewujudkan good governance dalam pelayanan publik.
- 8) Tingginya tuntutan untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan pendapatan daerah.

## **B. Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Baubau berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peluang peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi

setiap usaha yang menjadi obyek pajak.

- 3) Adanya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga tarif atas pajak dan retribusi di tahun 2024 akan mengalami kenaikan.
- 4) Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT dengan adanya website sebagai media informasi publik dan perluasan kanal-kanal pembayaran.
- 5) Menguatnya kebijakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta tumbuhnya para pelaku industri *startup* dan layanan PPOB (*Payment Point Online Banking*) pada jaringan minimarket.
- 6) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi terhadap tarif yang menyesuaikan dengan harga pasar.
- 7) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- 8) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Setelah melakukan beberapa kajian pada tahun 2019-2023, terdapat beberapa peluang tambahan bagi pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, antara lain sebagai berikut:

- a. Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang semula melakukan pengelolaan seluruh Pendapatan Daerah saat bergabung

- dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah menjadi OPD yang melakukan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Bapenda akan lebih fokus terhadap kontribusi terbesar pendapatan daerah yaitu Pajak Daerah dan juga akan fokus terhadap pengembangan Potensi Retribusi Daerah;
- b. Pentingnya memperkuat Bapenda melalui sarana dan prasarana yang memadai dan diperkuat dari sisi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah.

### **2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Jika isu internal dan dinamika eksternal khususnya selama dua tahun yang akan datang dapat diidentifikasi dengan baik, maka Bapenda akan dapat mempertahankan atau meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Jika tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan yang menjadi tanggung Bapenda.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu

strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi yang signifikan

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan berpengaruh terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Baubau ke depan, maka perlu menentukan isu-isu strategis yang dapat diangkat, yaitu:

**Tabel 2.19**  
**Isu Strategis Pada Badan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2025 - 2030**

| Potensi Daerah<br>(Kewenangan<br>Bapenda)                                         | Permasalahan<br>Perangkat Daerah                       | Isu KLHS Relevan                                              | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan perangkat daerah      |                                               |                                                        | Isu Strategis Perangkat Daerah                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                        |                                                               | Isu Global                                                       | Isu Nasional                                  | Isu Regional                                           |                                                                                                                                                                |
| Pajak Daerah<br>(Hotel, Restoran,<br>Hiburan, Reklame,<br>PBB-P2, BPHTB,<br>dll.) | Pajak daerah belum optimal                             | Penerapan green tax & keadilan fiskal                         | Tuntutan transparansi & digitalisasi tata kelola keuangan publik | Implementasi UU No. 1/2022 HKPD               | Kesenjangan kontribusi PAD antar daerah                | Optimalisasi pemungutan pajak berbasis digital & data integrasi seta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak                                           |
| Retribusi Daerah<br>(jasa umum, usaha, perizinan tertentu)                        | Retribusi daerah tidak sesuai nilai keekonomian        | Retribusi mendukung lingkungan (sampah, parkir, ruang publik) | Green economy & sustainable city                                 | Transformasi digital pelayanan publik         | Masalah perkotaan (sampah, transportasi, ruang publik) | Digitalisasi pembayaran, modernisasi regulasi retribusi, penyesuaian tarif sesuai dengan UU HKPD dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/retribusi |
| Pemanfaatan Aset Daerah                                                           | Aset daerah yang menganggur                            | Pemanfaatan aset ramah lingkungan                             | Global dorongan efisiensi & green asset management               | Kebijakan nasional optimalisasi BMD           | Perbedaan kapasitas pengelolaan aset antar daerah      | Optimalisasi aset daerah secara produktif, transparan, ramah lingkungan                                                                                        |
| Lain-lain PAD yang sah                                                            | Lain-lain PAD tidak berkembang dan tidak dapat terukur | Diversifikasi PAD berkelanjutan                               | Green financing, digital economy                                 | Agenda SDGs 2030 (pilar ekonomi & lingkungan) | Ketergantungan fiskal pada transfer pusat              | Diversifikasi sumber PAD berbasis inovasi & teknologi mendukung kemandirian fiskal daerah dan pembangunan berkelanjutan                                        |
| Kelembagaan & SDM Bapenda                                                         | Kinerja pengelolaan PAD belum optimal                  | Kelembagaan responsif terhadap isu keberlanjutan              | Global trend capacity building fiskal daerah                     | Kebijakan fiskal nasional: kemandirian daerah | Kapasitas fiskal daerah tidak merata                   | Penguatan Kapasitas SDM, kelembagaan & tata kelola PAD                                                                                                         |

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Visi dan Misi Wali Kota Baubau dan Wakil Wali Kota Baubau dituangkan dalam RPJMD Kota Baubau 2025-2029, dengan visi sebagai berikut:

***Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat***

Misi Wali Kota Baubau dan Wakil Wali Kota Baubau dalam RPJMD diartikan sebagai upaya umum yang hendak ditempuh dalam mewujudkan visi. Adapun misi RPJMD Kota Baubau 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk insan seutuhnya (cerdas, sehat, dan berakhlak).
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota yang inovatif, berkualitas, dan inklusif serta menumbuhkembangkan perekonomian berbasis potensi daerah, perdagangan, dan jasa.
3. Mengembangkan kawasan-kawasan potensial dan infrastruktur kota yang merata dan berkualitas.
4. **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang didukung oleh teknologi informasi yang handal dan aparatur yang berintegritas, profesional, dan bersih.**
5. Menata dan membentuk lingkungan kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan.

Adapun Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2029 merujuk pada Misi ke 4 yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang didukung oleh teknologi informasi**

yang handal dan aparaturnya yang berintegritas, profesional, dan bersih. Terhubung pada Tujuan Daerah nomor 5 yaitu **Meningkatnya efektivitas birokrasi dalam mewujudkan tata kelola berintegritas** dan Sasaran Daerah nomor 15 yaitu **Terpeliharanya integritas, profesionalisme dan perilaku aparat yang bersih** serta Sasaran Daerah nomor 13 yaitu **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan**. Adapun Indikator lainnya terhubung pada Indikator Kinerja Daerah pada Daya Aspek Saing Daerah dengan indikator **Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB**.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Maka dari itu, seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai daya saing tinggi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau pada Renstra tahun 2025-2030 yaitu:

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan               | : <b>Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah</b>                                                                                                               |
| Indikator            | : <b>Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB</b>                                                                                                                      |
| Formula              | : Realisasi Pajak Daerah dibagi PDRB di kali 100%                                                                                                              |
| Definisi Operasional | : Ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode tertentu |

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (lima) tahun ke depan. Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2030 yaitu:

Sasaran 1 : **Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator 1          | : | <b>Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Formula              | : | Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah di kali 100%                                                                                                                                                                 |
| Definisi Operasional | : | Ukuran tingkat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu (Tahunan) yang dinyatakan dalam persentase.                                                                |
| Sasaran 2            | : | <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah</b>                                                                                                                                                                        |
| Indikator 2          | : | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Formula              | : | AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), D (0-30)                                                                                                                                                               |
| Definisi Operasional | : | Hasil pengukuran kinerja akuntabilitas perangkat daerah berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. |

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Kota Baubau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Badan Pendapatan Kota Baubau Tahun 2025-2030**

**Visi** : Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat  
**Misi** : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang didukung oleh teknologi informasi yang handal dan aparatur yang berintegritas, profesional, dan bersih.  
**IKD** : ASPEK DAYA SAING DAERAH - Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

| TUJUAN DAERAH                                                                    | SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                     | TUJUAN OPD                              | SASARAN OPD                                                          | INDIKATOR                                 | FORMULA                                                                                           | TARGET 2025 | TARGET 2026 | TARGET 2027 | TARGET 2028 | TARGET 2029 | TARGET 2030 | KET.                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Meningkatnya efektivitas birokrasi dalam mewujudkan tata kelola berintegritas | 15. Terpeliharanya integritas, profesionalisme dan perilaku aparat yang bersih | Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah |                                                                      | Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB          | Realisasi Pajak Daerah dibagi PDRB di kali 100%                                                   | 0,33%       | 0,36%       | 0,39%       | 0,42%       | 0,46%       | 0,50%       | Ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode tertentu.                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                |                                         | Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah                       | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah di kali 100%                | 86,00%      | 88,00%      | 90,00%      | 92,00%      | 94,00%      | 95,00%      | Ukuran tingkat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu (Tahunan) yang dinyatakan dalam persentase.                                                                 |
| 5. Meningkatnya efektivitas birokrasi dalam mewujudkan tata kelola berintegritas | 13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan      |                                         | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah              | NILAI SAKIP: AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), D (0-30) | B (74,00)   | B (75,00)   | B (77,00)   | B (78,00)   | BB (80,00)  | BB (82,00)  | Hasil pengukuran kinerja akuntabilitas perangkat daerah berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. |

Berikut ini penahapan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030.

**Tabel.3.2**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030**

| Tujuan/Sasaran                                                                                                                                                                                                                                        | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                         | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan:</b><br><b>Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah.</b><br><b>Sasaran 1:</b><br><b>Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.</b><br><b>Sasaran 2:</b><br><b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah.</b> | Tahap <b>implementasi awal</b> : mulai penerapan sistem digital untuk pemungutan pajak dan retribusi, intensifikasi pendataan objek/subjek pajak baru, uji coba kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis. | Tahap <b>penguatan implementasi</b> : optimalisasi sistem pembayaran digital, peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, penyesuaian tarif retribusi sesuai hasil kajian keekonomian, serta perluasan kerja sama aset daerah yang lebih produktif. | Tahap <b>ekspansi dan inovasi</b> : pengembangan inovasi PAD berbasis teknologi (misalnya e-tax, pajak digital, e-retribusi), penerapan prinsip green tax dan eco-retribusi, serta peningkatan integrasi data lintas perangkat daerah untuk memperluas basis pendapatan. | Tahap <b>pemantapan dan replikasi</b> : sistem pemungutan PAD berbasis digital sudah terintegrasi penuh, peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui kontribusi PAD > target rata-rata nasional, serta penguatan kelembagaan Bapenda menuju organisasi yang modern, transparan, dan akuntabel. | Tahap <b>konsolidasi dan keberlanjutan</b> : evaluasi menyeluruh capaian Renstra, penyusunan rekomendasi kebijakan keberlanjutan PAD untuk Renstra periode berikutnya, dan penguatan ekosistem fiskal daerah yang adaptif terhadap tantangan global, nasional, dan regional. |

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

### **3.2.1 Strategi**

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Adapun Alternatif strategi dalam peningkatan PAD di Kota Baubau dapat dirumuskan dengan pendekatan analisis SWOT. Analisis matriks SWOT dengan mencocokkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dengan faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh dalam peningkatan PAD di Kota Baubau.

**Tabel 3.3**  
**Strategi Pengelolaan PAD dari Matriks SWOT**

| <div> <div>LINGKUNGAN INTERNAL</div> <div>LINGKUNGAN EKSTERNAL</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STRENGTHS/ KEKUATAN (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WEAKNESSES/ KELEMAHAN (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Regulasi yang jelas disusun sesuai dengan UU HKPD.</li> <li>Bertambahnya potensi pajak dan retribusi daerah berbagai sektor.</li> <li>Pengelolaan anggaran yang efektif dalam melaksanakan pelayanan.</li> <li>Sistem informasi pajak daerah yang mulai berkembang (SIMPBB, SIMPAD, SIMBPHTB)</li> <li>Dukungan dari Kepala Daerah, BUMD dan pihak ketiga dalam peningkatan PAD.</li> <li>Adanya OPD Bapenda sebagai OPD yang fokus meningkatkan PAD.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Basis data obyek dan subyek pajak belum lengkap/terintegrasi.</li> <li>Struktur Organisasi belum memaksimalkan kinerja organisasi.</li> <li>SDM yang terbatas kompetensi dan profesionalismenya.</li> <li>Kepatuhan wajib pajak/wajib retribusi masih rendah.</li> <li>Infrastruktur IT terbatas dan belum terintegrasi by NIK dan Pemungutan PAD masih belum semua terdigitalisasi/online.</li> <li>Aset Pemda belum optimal sebagai Passive income</li> </ol> |
| OPPORTUNITIES/ PELUANG (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STRATEGI S-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STRATEGI W-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) memberi ruang optimalisasi PAD.</li> <li>Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah.</li> <li>Digitalisasi dan elektronifikasi pelayanan pajak dan retribusi daerah (Qris dan pembayaran online).</li> <li>Kerjasama dengan pihak ketiga BUMD/Swasta/LSM dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>Reformasi Birokrasi dan e-government.</li> <li>Pertumbuhan ekonomi lokal yang meningkat (Pariwisata, Perdagangan, Pelayanan jasa).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalkan pajak dan retribusi dengan basis data digital terintegrasi sesuai UU HKPD.</li> <li>Kembangkan potensi ekonomi daerah (pariwisata, perdagangan) dengan sistem pajak digital.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkuat pengawasan &amp; penegakan hukum untuk mengurangi kebocoran PAD.</li> <li>Kembangkan kebijakan fiskal adaptif terhadap isu global (green tax, regulasi baru).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THREATS/ ANCAMAN (T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STRATEGI S-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STRATEGI W-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan regulasi pusat yang membatasi kewenangan fiskal daerah.</li> <li>Keberatan masyarakat terhadap pungutan baru dan peningkatan tarif.</li> <li>Resiko kebocoran dan korupsi.</li> <li>Kondisi ekonomi nasional yang tidak menentu</li> <li>Ketergantungan yang tinggi pada Dana Transfer</li> <li>Tumpang tindih kewenangan dengan instansi pusat/provinsi.</li> </ol>                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkatkan kapasitas SDM &amp; sistem informasi dengan dukungan program digitalisasi Nasional.</li> <li>Manfaatkan peluang kerja sama pihak ketiga untuk mengoptimalkan aset menganggur.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi kelembagaan &amp; tata kelola agar lebih efisien dalam menghadapi ketergantungan transfer pusat.</li> <li>Diversifikasi sumber PAD berbasis inovasi &amp; keberlanjutan untuk mengurangi risiko fiskal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                  |

Dari banyaknya strategi yang dipetakan oleh matriks SWOT maka dapat disimpulkan pada 3 strategi utama untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yaitu pada tabel berikut ini.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Modernisasi Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah.
4. Diversifikasi dan Inovasi Sumber Pendapatan Daerah.
5. Penguatan SDM dan Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah.

### 3.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Penertiban pengelolaan pendapatan daerah.

**Tabel. 3.4**

**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra  
Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau**

| No. | Operasional NPSK                                                                                                                                                        | Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                                                        | Ket. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | 1. Norma transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah<br>2. Standar digitalisasi layanan pajak dan retribusi.                                                | 1. Perkuatan sistem birokrasi dan budaya kerja yang profesional, bebas KKN dan bersih melayani.<br>2. Perkuatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta akses dan informasi pelayanan publik yang akurat dan mutakhir,<br>3. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, cepat dan berbasis ITK dalam kerangka smart governance. | 1. Penguatan basis data objek/subjek pajak daerah berbasis digital.<br>2. Pengembangan layanan pajak daerah secara online (e-SPPT, e-BPHTB, e-Billing).<br>3. Publikasi laporan realisasi PAD secara terbuka. |      |
| 2.  | 1. Prosedur harmonisasi peraturan daerah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.<br>2. Kriteria penetapan tarif retribusi yang berbasis biaya layanan dan berkeadilan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Penyesuaian perda pajak/retribusi sesuai ketentuan Nasional.<br>2. Penerapan tarif yang mendukung keberlanjutan (green tax, eco-tax).<br>3. Penyusunan regulasi inovatif untuk penggalan potensi PAD baru. |      |
| 3.  | 1. Norma efisiensi pemanfaatan aset daerah.<br>2. Standar inventarisasi dan pelaporan aset.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Pemutakhiran data aset idle dan strategis.<br>2. Pemanfaatan aset melalui kerja sama pemkot dan pihak swasta.<br>3. Pengelolaan aset produktif yang berorientasi pada peningkatan PAD.                     |      |

| No. | Operasional NPSK                                                                                                                                                                         | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                                                                                           | Ket. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kriteria inovasi pendapatan daerah sesuai prinsip keberlanjutan.</li> <li>Norma adaptasi fiskal terhadap perkembangan ekonomi digital.</li> </ol> |                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggalian potensi PAD berbasis digital ekonomi.</li> <li>Penerapan instrumen fiskal yang mendukung pembangunan hijau.</li> <li>Inovasi layanan fiskal berbasis teknologi.</li> </ol>                     |      |
| 5.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Norma profesionalisme dan akuntabilitas aparatur pengelola PAD.</li> <li>Standar kompetensi teknis bidang pajak/retribusi daerah.</li> </ol>      |                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi.</li> <li>Penguatan tata kelola berbasis kinerja.</li> <li>Peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam pengelolaan PAD</li> </ol> |      |

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2025-2030 dicantumkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi</b>           | <b>: Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat</b>                                                                                                          |
| <b>Misi</b>           | <b>: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang didukung oleh teknologi informasi yang handal dan aparatur yang berintegritas, profesional, dan bersih.</b> |
| <b>IKD</b>            | <b>: ASPEK DAYA SAING DAERAH - Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB</b>                                                                                                                |
| <b>Tujuan Daerah</b>  | <b>: Meningkatnya efektivitas birokrasi dalam mewujudkan tata kelola berintegritas</b>                                                                                             |
| <b>Sasaran Daerah</b> | <b>: 15. Terpeliharanya integritas, profesionalisme dan perilaku aparat yang bersih</b>                                                                                            |
|                       | <b>13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan</b>                                                                                                   |

| NO. | TUJUAN OPD                              | SASARAN OPD                                    | STRATEGI                                        | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah | Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan basis data objek/subjek pajak daerah berbasis digital.</li> <li>Pengembangan layanan pajak daerah secara online (e-SPPT, e-BPHTB, e-Billing).</li> <li>Publikasi laporan realisasi PAD secara terbuka.</li> </ol>  |
|     |                                         |                                                | Modernisasi Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian perda pajak/retribusi sesuai ketentuan Nasional.</li> <li>Penerapan tarif yang mendukung keberlanjutan (green tax, eco-tax).</li> <li>Penyusunan regulasi inovatif untuk penggalian potensi PAD baru.</li> </ol> |
|     |                                         |                                                | Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran data aset idle dan strategis.</li> </ol>                                                                                                                                                                        |

| NO. | TUJUAN OPD | SASARAN OPD                                                          | STRATEGI                                           | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                                      |                                                    | 2. Pemanfaatan aset melalui kerja sama pemkot dan pihak swasta.<br>3. Pengelolaan aset produktif yang berorientasi pada peningkatan PAD.                                                    |
|     |            |                                                                      | Diversifikasi dan Inovasi Sumber Pendapatan Daerah | 1. Penggalan potensi PAD berbasis digital ekonomi.<br>2. Penerapan instrumen fiskal yang mendukung pembangunan hijau.<br>3. Inovasi layanan fiskal berbasis teknologi.                      |
|     |            | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah | Penguatan SDM dan Kelembagaan Bapenda              | 1. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi.<br>2. Penguatan tata kelola berbasis kinerja.<br>3. Peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam pengelolaan PAD |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka terdapat 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau selama Renstra tahun 2025 - 2030. Program tersebut memiliki indikator kinerja yang merupakan suatu bentuk tindakan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra perangkat daerah, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Sejumlah indikator tersebut memiliki kelompok sasaran dan kerangka pendanaan dalam bentuk pagu indikatif. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan. Adapun rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun sebagai berikut:

## **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektorial Daerah

### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

### **d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

### **e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**f. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

### **a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan**  
**RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025 - 2030**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                          | TUJUAN                                  | SASARAN                                        | OUTCOME                                                        | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                   | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                      | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                         | (02)                                    | (03)                                           | (04)                                                           | (05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (06)                                                                                        | (07)                                                  | (08)       |
| <b>5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                      |                                         |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                       |            |
| - Terpeliharanya integritas, profesionalisme dan perilaku aparat yang bersih | Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))                                                      |                                                       |            |
|                                                                              |                                         | Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase capaian penerimaan pendapatan asli daerah (%)                                    |                                                       |            |
|                                                                              |                                         |                                                | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)                                      | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH       |            |
|                                                                              |                                         |                                                |                                                                | 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah I (PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Wallet, Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB.), 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Wilayah 2 (Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, Retribusi PKD), 3. Peningkatan Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Pendapatan Berbasis Digital dan Peningkatan Pengawasan secara sistematis | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen) | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN<br>(01) | TUJUAN<br>(02) | SASARAN<br>(03) | OUTCOME<br>(04) | OUTPUT<br>(05) | INDIKATOR<br>(06)                                                                                                | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>(07)                                                           | KETERANGAN<br>(08) |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)  | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)                                                | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)                        | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                                               | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                  | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                                                        | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)                             | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)                   | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)                        | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)                                  | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)                                                             | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)                                                       | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)                                                      | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                                                        | 5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           |                    |
|                                             |                |                 |                 |                | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)  | 5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |                    |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                              | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                              | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)                                                                 | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                             | (07)                                                                                                                                          | (08)       |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)                        | 5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)                                                      | 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)                   | 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)                                                       | 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                  | 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)                                                             | 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)                      | 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)                                                | 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                                               | 5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)                        | 5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)                             | 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    |            |
|                                     |        |                                                                      |         |        | Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)                                  | 5.02.04.2.01.0015 - Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                 |            |
|                                     |        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah |         |        | Nilai SAKIP Daerah (Angka)                                                                                       |                                                                                                                                               |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                           | OUTPUT                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                              | (05)                                                                                                  | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                            | (08)       |
|                                     |        |         | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah |                                                                                                       | Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                                                                                                                    | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |            |
|                                     |        |         |                                                                   | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)                                                                                     | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  |            |
|                                     |        |         |                                                                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi                                                                                                                   | 5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD        |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                          | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                    | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                                                      | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                  |                                                                                                           |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)                                                                                     | 5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah                         |            |
|                                     |        |         |         | Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                     | 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                    | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                    | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                                                   | (06)                                                                                                                                                         | (07)                                                                                                | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                 | 5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang Lengkap, Valid, dan Terupdate                                             | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                   | 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                               |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                  | 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                               |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                  | 5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                   | 5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |            |
|                                     |        |         |         | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang valid dan akurat                                                             | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)                                                                                                        | 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                           |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)                                                                                                        | 5.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                          |            |
|                                     |        |         |         | Laporan Administrasi Kepegawaian secara Berkala Terkait Kondisi Kepegawaian, Absensi, Pelatihan, Dan Pengembangan SDM. | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                 | 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                                   | 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                               | 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                  | 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN<br>(01) | TUJUAN<br>(02) | SASARAN<br>(03) | OUTCOME<br>(04) | OUTPUT<br>(05)                                                               | INDIKATOR<br>(06)                                                                           | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>(07)                                             | KETERANGAN<br>(08) |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              | 5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                  | 5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                | 5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                    |
|                                             |                |                 |                 | Laporan Pelayanan Administrasi Umum dan Rutin yang Efisien dan Terkoordinasi | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)      | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                           | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                         | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                      | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                 | 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                      | 5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                    |
|                                             |                |                 |                 |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                 | 5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                    |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                      | INDIKATOR                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                       | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                        | (06)                                                                                             | (07)                                                                                   | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                                | 5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                           |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |            |
|                                     |        |         |         | Pengadaan Unit Barang Milik Daerah Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Spesifikasi                | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |            |
|                                     |        |         |         | Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Tepat Waktu dan Berkualitas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                         | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                        | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                           | (06)                                                                                                          | (07)                                                                                                                                    | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |            |
|                                     |        |         |         | Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                    | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                          | (07)                                                                                                                                | (08)       |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel                                                                                              |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |            |

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Jangka Menengah**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025 - 2030**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT        | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                            | KETER<br>ANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |                                                                        |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                |                |
|                                                                                   |                                                                        |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                |                |
| (01)                                                                              | (02)                                                                   | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                           | (15)           |
| 5.02 - KEUANGAN                                                                   |                                                                        |                           |                                 | 10.615.184.000 |        | 11.357.184.000 |        | 12.192.184.000 |        | 13.037.392.000 |        | 13.307.392.000 |                                                                |                |
| 5.02.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                                                                        |                           |                                 | 7.555.184.000  |        | 7.847.184.000  |        | 8.232.184.000  |        | 8.627.392.000  |        | 8.897.392.000  |                                                                |                |
| Meningkatnya Kualitas<br>Kinerja Pembangunan<br>Badan Pendapatan Daerah           | Persentase Pelayanan<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>(%) | 93,64                     | 94,5                            | 7.555.184.000  | 95,5   | 7.847.184.000  | 96,5   | 8.232.184.000  | 97     | 8.627.392.000  | 97,5   | 8.897.392.000  | 5.02.0.00.0.00<br>.03.0000 -<br>BADAN<br>PENDAPATA<br>N DAERAH |                |
| 5.02.01.2.01 -<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan                               |                                                                        |                           |                                 | 94.000.000     |        | 94.000.000     |        | 94.000.000     |        | 94.000.000     |        | 94.000.000     |                                                                |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                            | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                     |                |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                     |                |
| (01)                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)                | (15)           |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                     |                |
| Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2                         | 2                               | 94.000.000 | 2      | 94.000.000 | 2      | 94.000.000 | 2      | 94.000.000 | 2      | 94.000.000 |                     |                |
|                                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 24                        | 24                              |            | 24     |            | 24     |            | 24     |            | 24     |            |                     |                |
|                                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            |                     |                |
|                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)                                                                                     | 2                         | 2                               |            | 2      |            | 2      |            | 2      |            | 2      |            |                     |                |
|                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 4                         | 4                               |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            |                     |                |
|                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 2                         |                                 |            | 2      |            | 2      |            | 2      |            | 2      |            |                     |                |
|                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 2                         | 2                               |            | 2      |            | 2      |            | 2      |            | 2      |            |                     |                |
|                                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            |                     |                |
| 5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 18.000.000 |        | 18.000.000 |        | 18.000.000 |        | 18.000.000 |        | 18.000.000 |                     |                |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 4                         | 4                               | 18.000.000 | 4      | 18.000.000 | 4      | 18.000.000 | 4      | 18.000.000 | 4      | 18.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                             | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                                                     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                     |                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                           | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                     |                |
| (01)                                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                                              | (03)                      | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)                | (15)           |
| 5.02.01.2.01.0002 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                                                                |                                                                                                                                                   |                           |                                 | 8.000.000  |        | 8.000.000  |        | 8.000.000  |        | 8.000.000  |        | 8.000.000  |                     |                |
| Tersedianya Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                                      | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                           | 1                         | 1                               | 8.000.000  | 1      | 8.000.000  | 1      | 8.000.000  | 1      | 8.000.000  | 1      | 8.000.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.01.0003 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      |                                                                                                                                                   |                           |                                 | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                     | 2                         | 2                               | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.01.0004 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                                                                           |                                                                                                                                                   |                           |                                 | 8.000.000  |        | 8.000.000  |        | 8.000.000  |        | 8.000.000  |        | 8.000.000  |                     |                |
| Tersedianya Dokumen<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD<br>(Dokumen)                                           | 1                         | 1                               | 8.000.000  | 1      | 8.000.000  | 1      | 8.000.000  | 1      | 8.000.000  | 1      | 8.000.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.01.0005 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD                                                                             |                                                                                                                                                   |                           |                                 | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD (Dokumen)                     | 2                         |                                 | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.01.0006 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                               |                                                                                                                                                   |                           |                                 | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja | 2                         | 2                               | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 | 2      | 12.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                 | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER-<br>ANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                     |                 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                     |                 |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                                | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                | (15)            |
| dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                     | dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan)                                                                                                                                    |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                     |                 |
| 5.02.01.2.01.0007 -<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                |                                                                                                                                                                                     |                           |                                 | 18.000.000    |        | 18.000.000    |        | 18.000.000    |        | 18.000.000    |        | 18.000.000    |                     |                 |
| Terlaksananya Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                         | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah (Laporan)                                                                                                                    | 24                        | 24                              | 18.000.000    | 24     | 18.000.000    | 24     | 18.000.000    | 24     | 18.000.000    | 24     | 18.000.000    |                     |                 |
| 5.02.01.2.01.0008 -<br>Penyelenggaraan Wali data<br>Pendukung Statistik<br>Sektoral Daerah |                                                                                                                                                                                     |                           |                                 | 6.000.000     |        | 6.000.000     |        | 6.000.000     |        | 6.000.000     |        | 6.000.000     |                     |                 |
| Terselenggaranya Wali<br>data Pendukung Statistik<br>Sektoral Daerah                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Wali<br>data Pendukung Statistik<br>Sektoral Daerah<br>(Dokumen)                                                                            | 2                         | 2                               | 6.000.000     | 2      | 6.000.000     | 2      | 6.000.000     | 2      | 6.000.000     | 2      | 6.000.000     |                     |                 |
| 5.02.01.2.02 - Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                |                                                                                                                                                                                     |                           |                                 | 5.029.064.000 |        | 5.239.064.000 |        | 5.444.064.000 |        | 5.644.064.000 |        | 5.744.000.000 |                     |                 |
| Laporan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah yang disusun tepat<br>waktu           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN<br>(Dokumen)                                                                                               | 12                        | 12                              | 5.029.064.000 | 12     | 5.239.064.000 | 12     | 5.444.064.000 | 12     | 5.644.064.000 | 12     | 5.744.000.000 |                     |                 |
|                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD (Laporan)                                         | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                     |                 |
|                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Sem-<br>esteran SKPD (Laporan) | 18                        | 18                              |               | 18     |               | 18     |               | 18     |               | 18     |               |                     |                 |
|                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                            | 894                       | 980                             |               | 980    |               | 980    |               | 980    |               | 980    |               |                     |                 |
| 5.02.01.2.02.0001 -<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                                     |                           |                                 | 4.900.000.000 |        | 5.100.000.000 |        | 5.300.000.000 |        | 5.500.000.000 |        | 5.600.000.000 |                     |                 |
| Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                            | 894                       | 980                             | 4.900.000.000 | 980    | 5.100.000.000 | 980    | 5.300.000.000 | 980    | 5.500.000.000 | 980    | 5.600.000.000 |                     |                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                   | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                     |                |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                     |                |
| (01)                                                                                                                                                                         | (02)                                                                                                                                                                               | (03)                      | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)                | (15)           |
| 5.02.01.2.02.0002 -<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 84.000.000 |        | 84.000.000 |        | 84.000.000 |        | 84.000.000 |        | 84.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN<br>(Dokumen)                                                                                              | 12                        | 12                              | 84.000.000 | 12     | 84.000.000 | 12     | 84.000.000 | 12     | 84.000.000 | 12     | 84.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.02.0005 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 20.064.000 |        | 25.064.000 |        | 30.064.000 |        | 30.064.000 |        | 30.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD (Laporan)                                        | 1                         | 1                               | 20.064.000 | 1      | 25.064.000 | 1      | 30.064.000 | 1      | 30.064.000 | 1      | 30.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.02.0007 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD                                                           |                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 25.000.000 |        | 30.000.000 |        | 30.000.000 |        | 30.000.000 |        | 30.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semes<br>teran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semes<br>teran SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Sem<br>esteran SKPD (Laporan) | 18                        | 18                              | 25.000.000 | 18     | 30.000.000 | 18     | 30.000.000 | 18     | 30.000.000 | 18     | 30.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.03 - Administrasi<br>Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 40.000.000 |        | 50.000.000 |        | 60.000.000 |        | 70.000.000 |        | 80.000.000 |                     |                |
| Dokumen dan Laporan<br>Barang Milik Daerah yang<br>Lengkap, Valid, dan<br>Terupdate                                                                                          | Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                               | 2                         | 2                               | 40.000.000 | 2      | 50.000.000 | 2      | 60.000.000 | 2      | 70.000.000 | 2      | 80.000.000 |                     |                |
|                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD (Laporan)                                                                             | 12                        | 12                              |            | 12     |            | 12     |            | 12     |            | 12     |            |                     |                |
| 5.02.01.2.03.0001 -<br>Penyusunan Perencanaan<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 20.000.000 |        | 25.000.000 |        | 30.000.000 |        | 35.000.000 |        | 40.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                             | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                        |                                                                                             |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                |
|                                                                                                                        |                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                |
| (01)                                                                                                                   | (02)                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)           |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                 | 2                         | 2                               | 20.000.000  | 2      | 25.000.000  | 2      | 30.000.000  | 2      | 35.000.000  | 2      | 40.000.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  |                                                                                             |                           |                                 | 20.000.000  |        | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 35.000.000  |        | 40.000.000  |                     |                |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)  | 12                        | 12                              | 20.000.000  | 12     | 25.000.000  | 12     | 30.000.000  | 12     | 35.000.000  | 12     | 40.000.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                              |                                                                                             |                           |                                 | 90.000.000  |        | 95.000.000  |        | 100.000.000 |        | 105.000.000 |        | 110.000.000 |                     |                |
| Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang valid dan akurat                                                             | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)                                       | 12                        | 12                              | 90.000.000  | 12     | 95.000.000  | 12     | 100.000.000 | 12     | 105.000.000 | 12     | 110.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                             |                                                                                             |                           |                                 | 90.000.000  |        | 95.000.000  |        | 100.000.000 |        | 105.000.000 |        | 110.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)                                       | 12                        | 12                              | 90.000.000  | 12     | 95.000.000  | 12     | 100.000.000 | 12     | 105.000.000 | 12     | 110.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               |                                                                                             |                           |                                 | 200.000.000 |        | 210.000.000 |        | 220.000.000 |        | 230.000.000 |        | 240.000.000 |                     |                |
| Laporan Administrasi Kepegawaian secara Berkala Terkait Kondisi Kepegawaian, Absensi, Pelatihan, Dan Pengembangan SDM. | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                  | 2                         | 12                              | 200.000.000 | 12     | 210.000.000 | 12     | 220.000.000 | 12     | 230.000.000 | 12     | 240.000.000 |                     |                |
|                                                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                     |                |
|                                                                                                                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0                         | 5                               |             | 5      |             | 5      |             | 5      |             | 5      |             |                     |                |
|                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                |
| 5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas                                                                            |                                                                                             |                           |                                 | 110.000.000 |        | 110.000.000 |        | 110.000.000 |        | 110.000.000 |        | 110.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT        | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER-<br>ANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                   |                                                                                             |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                 |
|                                                                                   |                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                 |
| (01)                                                                              | (02)                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)            |
| beserta Atribut Kelengkapannya                                                    |                                                                                             |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                     |                 |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              | 1                         | 1                               | 110.000.000 | 1      | 110.000.000 | 1      | 110.000.000 | 1      | 110.000.000 | 1      | 110.000.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                             |                           |                                 | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 35.000.000  |        | 40.000.000  |        | 45.000.000  |                     |                 |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                  | 2                         | 12                              | 25.000.000  | 12     | 30.000.000  | 12     | 35.000.000  | 12     | 40.000.000  | 12     | 45.000.000  |                     |                 |
| 5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                                                                                             |                           |                                 | 35.000.000  |        | 40.000.000  |        | 45.000.000  |        | 50.000.000  |        | 55.000.000  |                     |                 |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                | 12                        | 12                              | 35.000.000  | 12     | 40.000.000  | 12     | 45.000.000  | 12     | 50.000.000  | 12     | 55.000.000  |                     |                 |
| 5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                             |                           |                                 | 30.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.000.000  |                     |                 |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0                         | 5                               | 30.000.000  | 5      | 30.000.000  | 5      | 30.000.000  | 5      | 30.000.000  | 5      | 30.000.000  |                     |                 |
| 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                                                                                             |                           |                                 | 582.120.000 |        | 667.120.000 |        | 752.120.000 |        | 837.120.000 |        | 872.120.000 |                     |                 |
| Laporan Pelayanan Administrasi Umum dan Rutin yang Efisien dan Terkoordinasi      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12                        | 12                              | 582.120.000 | 12     | 667.120.000 | 12     | 752.120.000 | 12     | 837.120.000 | 12     | 872.120.000 |                     |                 |
|                                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)      | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                 |
|                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                           | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                 |
|                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                 |
|                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan                                                             | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                           | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                      |                                                                                                        |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                |
|                                                                                                      |                                                                                                        |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                |
| (01)                                                                                                 | (02)                                                                                                   | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)           |
|                                                                                                      | Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                     |                |
|                                                                                                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket) | 4                         | 4                               |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             |                     |                |
|                                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan (Paket)                           | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                |
|                                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan (Paket)                                      | 4                         | 4                               |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             |                     |                |
| 5.02.01.2.06.0001 -<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor |                                                                                                        |                           |                                 | 8.000.000   |        | 13.000.000  |        | 18.000.000  |        | 23.000.000  |        | 28.000.000  |                     |                |
| Tersedianya Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                              | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket) | 4                         | 4                               | 8.000.000   | 4      | 13.000.000  | 4      | 18.000.000  | 4      | 23.000.000  | 4      | 28.000.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.06.0002 -<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               |                                                                                                        |                           |                                 | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 35.000.000  |        | 40.000.000  |        | 45.000.000  |                     |                |
| Tersedianya Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan (Paket)                           | 12                        | 12                              | 25.000.000  | 12     | 30.000.000  | 12     | 35.000.000  | 12     | 40.000.000  | 12     | 45.000.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.06.0003 -<br>Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                          |                                                                                                        |                           |                                 | 10.000.000  |        | 15.000.000  |        | 20.000.000  |        | 25.000.000  |        | 30.000.000  |                     |                |
| Tersedianya Peralatan<br>Rumah Tangga                                                                | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan (Paket)                                      | 4                         | 4                               | 10.000.000  | 4      | 15.000.000  | 4      | 20.000.000  | 4      | 25.000.000  | 4      | 30.000.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.06.0004 -<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           |                                                                                                        |                           |                                 | 107.000.000 |        | 107.000.000 |        | 107.000.000 |        | 107.000.000 |        | 107.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Bahan Logistik<br>Kantor                                                                 | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                       | 12                        | 12                              | 107.000.000 | 12     | 107.000.000 | 12     | 107.000.000 | 12     | 107.000.000 | 12     | 107.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.06.0005 -<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                                  |                                                                                                        |                           |                                 | 149.000.000 |        | 159.000.000 |        | 169.000.000 |        | 179.000.000 |        | 189.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                                                        | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                           | 12                        | 12                              | 149.000.000 | 12     | 159.000.000 | 12     | 169.000.000 | 12     | 179.000.000 | 12     | 189.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                     | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                |                                                                                                         |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                |
|                                                                                                |                                                                                                         |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                |
| (01)                                                                                           | (02)                                                                                                    | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)           |
| 5.02.01.2.06.0006 -<br>Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan         |                                                                                                         |                           |                                 | 13.000.000  |        | 18.000.000  |        | 23.000.000  |        | 28.000.000  |        | 33.000.000  |                     |                |
| Tersedianya Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan                               | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)      | 12                        | 12                              | 13.000.000  | 12     | 18.000.000  | 12     | 23.000.000  | 12     | 28.000.000  | 12     | 33.000.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.06.0008 -<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                                                                                                         |                           |                                 | 20.120.000  |        | 25.120.000  |        | 30.120.000  |        | 35.120.000  |        | 40.120.000  |                     |                |
| Terlaksananya Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu<br>(Laporan)                                                | 12                        | 12                              | 20.120.000  | 12     | 25.120.000  | 12     | 30.120.000  | 12     | 35.120.000  | 12     | 40.120.000  |                     |                |
| 5.02.01.2.06.0009 -<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD              |                                                                                                         |                           |                                 | 250.000.000 |        | 300.000.000 |        | 350.000.000 |        | 400.000.000 |        | 400.000.000 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)               | 12                        | 12                              | 250.000.000 | 12     | 300.000.000 | 12     | 350.000.000 | 12     | 400.000.000 | 12     | 400.000.000 |                     |                |
| 5.02.01.2.07 - Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah       |                                                                                                         |                           |                                 | 550.000.000 |        | 500.000.000 |        | 550.000.000 |        | 600.000.000 |        | 600.000.000 |                     |                |
| Pengadaan Unit Barang<br>Milik Daerah Secara Tepat<br>Waktu Dan Sesuai<br>Spesifikasi          | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Disediakan<br>(Unit)  | 0                         | 2                               | 550.000.000 | 2      | 500.000.000 | 2      | 550.000.000 | 2      | 600.000.000 | 2      | 600.000.000 |                     |                |
|                                                                                                | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Disediakan<br>(Unit) | 0                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                     |                |
|                                                                                                | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                    | 0                         | 5                               |             | 5      |             | 5      |             | 5      |             | 5      |             |                     |                |
|                                                                                                | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                            | 0                         | 5                               |             | 5      |             | 5      |             | 5      |             | 5      |             |                     |                |
| 5.02.01.2.07.0001 -<br>Pengadaan Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                         |                           |                                 | 150.000.000 |        | 150.000.000 |        | 150.000.000 |        | 150.000.000 |        | 150.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                      | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas                                       | 0                         | 2                               | 150.000.000 | 2      | 150.000.000 | 2      | 150.000.000 | 2      | 150.000.000 | 2      | 150.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                              | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER-<br>ANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                         |                                                                                                  |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                 |
|                                                                                                         |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                 |
| (01)                                                                                                    | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)            |
|                                                                                                         | Jabatan yang Disediakan (Unit)                                                                   |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                     |                 |
| 5.02.01.2.07.0005 -<br>Pengadaan Mebel                                                                  |                                                                                                  |                           |                                 | 200.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |                     |                 |
| Tersedianya Mebel                                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 0                         | 5                               | 200.000.000 | 5      | 100.000.000 | 5      | 100.000.000 | 5      | 100.000.000 | 5      | 100.000.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.07.0006 -<br>Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                         |                                                                                                  |                           |                                 | 100.000.000 |        | 150.000.000 |        | 200.000.000 |        | 250.000.000 |        | 250.000.000 |                     |                 |
| Tersedianya Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 5                               | 100.000.000 | 5      | 150.000.000 | 5      | 200.000.000 | 5      | 250.000.000 | 5      | 250.000.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.07.0010 -<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya         |                                                                                                  |                           |                                 | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |                     |                 |
| Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 0                         | 1                               | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.08 - Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                               |                                                                                                  |                           |                                 | 858.000.000 |        | 858.000.000 |        | 858.000.000 |        | 858.000.000 |        | 967.208.000 |                     |                 |
| Laporan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang Tersedia<br>Tepat Waktu dan<br>Berkualitas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                        | 12                              | 858.000.000 | 12     | 858.000.000 | 12     | 858.000.000 | 12     | 858.000.000 | 12     | 967.208.000 |                     |                 |
|                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                 |
|                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                 |
|                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                 |
| 5.02.01.2.08.0001 -<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                |                                                                                                  |                           |                                 | 10.000.000  |        | 10.000.000  |        | 10.000.000  |        | 10.000.000  |        | 10.000.000  |                     |                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                    | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                                | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER-<br>ANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                               |                                                                                                                              |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                 |
|                                                                                               |                                                                                                                              |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                 |
| (01)                                                                                          | (02)                                                                                                                         | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)            |
| Terlaksananya Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                | 12                        | 12                              | 10.000.000  | 12     | 10.000.000  | 12     | 10.000.000  | 12     | 10.000.000  | 12     | 10.000.000  |                     |                 |
| 5.02.01.2.08.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik          |                                                                                                                              |                           |                                 | 180.000.000 |        | 180.000.000 |        | 180.000.000 |        | 180.000.000 |        | 180.000.000 |                     |                 |
| Tersedianya Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan (Laporan)                 | 12                        | 12                              | 180.000.000 | 12     | 180.000.000 | 12     | 180.000.000 | 12     | 180.000.000 | 12     | 180.000.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.08.0003 -<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                                              |                           |                                 | 18.000.000  |        | 18.000.000  |        | 18.000.000  |        | 18.000.000  |        | 25.000.000  |                     |                 |
| Tersedianya Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                    | 12                        | 12                              | 18.000.000  | 12     | 18.000.000  | 12     | 18.000.000  | 12     | 18.000.000  | 12     | 25.000.000  |                     |                 |
| 5.02.01.2.08.0004 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                                              |                           |                                 | 650.000.000 |        | 650.000.000 | p      | 650.000.000 |        | 650.000.000 |        | 752.208.000 |                     |                 |
| Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 12                        | 12                              | 650.000.000 | 12     | 650.000.000 | 12     | 650.000.000 | 12     | 650.000.000 | 12     | 752.208.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.09 -<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah |                                                                                                                              |                           |                                 | 112.000.000 |        | 134.000.000 |        | 154.000.000 |        | 189.208.000 |        | 190.064.000 |                     |                 |
| Unit Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Yang Terpelihara       | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                              | 7                         | 12                              | 112.000.000 | 15     | 134.000.000 | 15     | 154.000.000 | 15     | 189.208.000 | 15     | 190.064.000 |                     |                 |
|                                                                                               | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                  | 1                         | 4                               |             | 4      |             | 4      |             | 5      |             | 5      |             |                     |                 |
|                                                                                               | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                       | 0                         | 5                               |             | 5      |             | 5      |             | 5      |             | 5      |             |                     |                 |
|                                                                                               | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara<br>dan dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 21                        | 21                              |             | 25     |             | 25     |             | 25     |             | 25     |             |                     |                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                              | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER-<br>ANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                     |                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                     |                 |
| (01)                                                                                                                                    | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)                | (15)            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                         | 10                              |            | 10     |            | 15     |            | 20     |            | 25     |            |                     |                 |
| 5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |                                 | 30.000.000 |        | 30.000.000 |        | 35.000.000 |        | 40.208.000 |        | 41.064.000 |                     |                 |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 21                        | 21                              | 30.000.000 | 25     | 30.000.000 | 25     | 35.000.000 | 25     | 40.208.000 | 25     | 41.064.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                               |                           |                                 | 20.000.000 |        | 25.000.000 |        | 35.000.000 |        | 45.000.000 |        | 45.000.000 |                     |                 |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                         | 10                              | 20.000.000 | 10     | 25.000.000 | 15     | 35.000.000 | 20     | 45.000.000 | 25     | 45.000.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 15.000.000 |        | 15.000.000 |        | 15.000.000 |        | 15.000.000 |        | 15.000.000 |                     |                 |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                                        | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 0                         | 5                               | 15.000.000 | 5      | 15.000.000 | 5      | 15.000.000 | 5      | 15.000.000 | 5      | 15.000.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                               |                           |                                 | 20.000.000 |        | 30.000.000 |        | 30.000.000 |        | 35.000.000 |        | 35.000.000 |                     |                 |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 7                         | 12                              | 20.000.000 | 15     | 30.000.000 | 15     | 30.000.000 | 15     | 35.000.000 | 15     | 35.000.000 |                     |                 |
| 5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                               |                           |                                 | 27.000.000 |        | 34.000.000 |        | 39.000.000 |        | 54.000.000 |        | 54.000.000 |                     |                 |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1                         | 4                               | 27.000.000 | 4      | 34.000.000 | 4      | 39.000.000 | 5      | 54.000.000 | 5      | 54.000.000 |                     |                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH                                            | KETER<br>ANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                                |                |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (02)                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                                                           | (15)           |
| 5.02.04 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                           |                                 | 3.060.000.000 |        | 3.510.000.000 |        | 3.960.000.000 |        | 4.410.000.000 |        | 4.410.000.000 |                                                                |                |
| Meningkatnya upaya<br>ekstensifikasi dan<br>intensifikasi pendapatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase PAD<br>terhadap Pendapatan<br>Daerah (Persentase)                                                                   | 13,05                     | 13,15                           | 3.060.000.000 | 13,2   | 3.510.000.000 | 13,25  | 3.960.000.000 | 13,35  | 4.410.000.000 | 13,45  | 4.410.000.000 | 5.02.0.00.0.00<br>.03.0000 -<br>BADAN<br>PENDAPATA<br>N DAERAH |                |
| 5.02.04.2.01 - Kegiatan<br>Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                           |                                 | 3.060.000.000 |        | 3.510.000.000 |        | 3.960.000.000 |        | 4.410.000.000 |        | 4.410.000.000 |                                                                |                |
| 1. Tingkat Kepatuhan Wajib<br>Pajak Wilayah I (PBB-P2,<br>BPHTB, Pajak Reklame,<br>Pajak Sarang Burung<br>Wallet, Opsen PKB, Opsen<br>BBNKB, Pajak MBLB.), 2.<br>Tingkat Kepatuhan Wajib<br>Pajak dan Wajib Retribusi<br>Wilayah 2 (Pajak Barang<br>dan Jasa Tertentu, Pajak<br>Air Tanah, Retribusi PKD),<br>3. Peningkatan Penerapan<br>Sistem Informasi<br>Penerimaan Pendapatan<br>Berdasarkan Digital dan<br>Peningkatan Pengawasan<br>secara sistematis | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Pajak Daerah<br>serta Pengembangan<br>Pajak Daerah dan<br>Kebijakan Pajak Daerah<br>(Dokumen) | 4                         | 5                               | 3.060.000.000 | 5      | 3.510.000.000 | 5      | 3.960.000.000 | 5      | 4.410.000.000 | 5      | 4.410.000.000 |                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penagihan<br>Pajak Daerah (Dokumen)                                                        | 12                        | 24                              |               | 24     |               | 24     |               | 24     |               | 24     |               |                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah (Dokumen)                          | 12                        | 12                              |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               |                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah (Unit)                                                              | 4                         | 6                               |               | 6      |               | 6      |               | 6      |               | 6      |               |                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Data Pelaporan<br>Pajak Daerah yang Telah<br>Dilakukan Penelitian dan<br>Verifikasi (Dokumen)                           | 52                        | 24                              |               | 24     |               | 24     |               | 24     |               | 24     |               |                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Objek Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP nya<br>(Obyek Pajak)                                                               | 2.500                     | 2.500                           |               | 2.500  |               | 2.500  |               | 2.500  |               | 2.500  |               |                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Layanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah<br>(Layanan)                                                                     | 3.000                     | 12                              |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               |                                                                |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                  | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                 |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                |
| (01)                                                                                                        | (02)                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)           |
|                                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah<br>(Laporan)                                   | 12                        | 4                               |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             |                     |                |
|                                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah<br>(Laporan)                           | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                |
|                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah (Laporan)                      | 4                         | 4                               |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             |                     |                |
|                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek Pajak<br>Daerah, Subjek Pajak<br>dan Wajib Pajak Daerah<br>(Laporan) | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                |
|                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah (Laporan)                                | 12                        | 24                              |             | 24     |             | 24     |             | 24     |             | 24     |             |                     |                |
|                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Pajak Daerah (Dokumen)                                                                 | 2                         | 2                               |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |                     |                |
|                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelesaian Keberatan<br>Pajak Daerah (Dokumen)                                                        | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                |
|                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Ketetapan Pajak Daerah<br>(Dokumen)                                                                           | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0001 -<br>Perencanaan Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                              |                                                                                                                                 |                           |                                 | 100.000.000 |        | 130.000.000 |        | 160.000.000 |        | 190.000.000 |        | 190.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Rencana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                             | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Pajak Daerah (Dokumen)                                                                 | 2                         | 2                               | 100.000.000 | 2      | 130.000.000 | 2      | 160.000.000 | 2      | 190.000.000 | 2      | 190.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0002 - Analisa<br>dan Pengembangan Pajak<br>Daerah, serta Penyusunan<br>Kebijakan Pajak Daerah |                                                                                                                                 |                           |                                 | 100.000.000 |        | 130.000.000 |        | 160.000.000 |        | 190.000.000 |        | 190.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Hasil Analis<br>Pajak Daerah serta<br>Terlaksananya<br>Pengembangan Pajak                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analis Pajak Daerah<br>serta Pengembangan<br>Pajak Daerah dan                                           | 4                         | 5                               | 100.000.000 | 5      | 130.000.000 | 5      | 160.000.000 | 5      | 190.000.000 | 5      | 190.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                |
| (01)                                                                                                                                                            | (02)                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)           |
| Daerah dan Kebijakan<br>Pajak Daerah                                                                                                                            | Kebijakan Pajak Daerah<br>(Dokumen)                                                                                             |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0003 -<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Pajak Daerah                                                                               |                                                                                                                                 |                           |                                 | 200.000.000 |        | 230.000.000 |        | 260.000.000 |        | 320.000.000 |        | 320.000.000 |                     |                |
| Terlaksananya Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah<br>(Laporan)                           | 12                        | 12                              | 200.000.000 | 12     | 230.000.000 | 12     | 260.000.000 | 12     | 320.000.000 | 12     | 320.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0004 -<br>Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                                           |                                                                                                                                 |                           |                                 | 400.000.000 |        | 430.000.000 |        | 460.000.000 |        | 490.000.000 |        | 490.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                                                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah (Unit)                                                               | 4                         | 6                               | 400.000.000 | 6      | 430.000.000 | 6      | 460.000.000 | 6      | 490.000.000 | 6      | 490.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0005 -<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek Pajak<br>Daerah                                                                                       |                                                                                                                                 |                           |                                 | 200.000.000 |        | 230.000.000 |        | 260.000.000 |        | 290.000.000 |        | 290.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Data Objek<br>Pajak, Subjek Pajak dan<br>Wajib Pajak Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek Pajak<br>Daerah, Subjek Pajak<br>dan Wajib Pajak Daerah<br>(Laporan) | 12                        | 12                              | 200.000.000 | 12     | 230.000.000 | 12     | 260.000.000 | 12     | 290.000.000 | 12     | 290.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0006 -<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                                                                    |                                                                                                                                 |                           |                                 | 160.000.000 |        | 190.000.000 |        | 220.000.000 |        | 250.000.000 |        | 250.000.000 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah (Laporan)                      | 4                         | 4                               | 160.000.000 | 4      | 190.000.000 | 4      | 220.000.000 | 4      | 250.000.000 | 4      | 250.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0007 -<br>Penilaian Pajak Bumi dan<br>Bangunan Perdesaan dan<br>Perkotaan (PBBP2) serta<br>Bea Perolehan Hak atas<br>Tanah dan Bangunan<br>(BPHTB) |                                                                                                                                 |                           |                                 | 250.000.000 |        | 280.000.000 |        | 310.000.000 |        | 340.000.000 |        | 340.000.000 |                     |                |
| Terpenuhinya Jumlah<br>Objek Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP nya                                                                                                 | Jumlah Objek Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP nya<br>(Obyek Pajak)                                                                | 2.500                     | 2.500                           | 250.000.000 | 2.500  | 280.000.000 | 2.500  | 310.000.000 | 2.500  | 340.000.000 | 2.500  | 340.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0008 -<br>Penetapan Wajib Pajak<br>Daerah                                                                                                          |                                                                                                                                 |                           |                                 | 300.000.000 |        | 320.000.000 |        | 360.000.000 |        | 360.000.000 |        | 360.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                             | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                         | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER<br>ANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                        |                                                                                                       |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                |
|                                                                                                        |                                                                                                       |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                |
| (01)                                                                                                   | (02)                                                                                                  | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)           |
| Tersedianya Dokumen<br>Ketetapan Pajak Daerah                                                          | Jumlah Dokumen<br>Ketetapan Pajak Daerah<br>(Dokumen)                                                 | 12                        | 12                              | 300.000.000 | 12     | 320.000.000 | 12     | 360.000.000 | 12     | 360.000.000 | 12     | 360.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0009 -<br>Pelayanan dan Konsultasi<br>Pajak Daerah                                        |                                                                                                       |                           |                                 | 150.000.000 |        | 180.000.000 |        | 210.000.000 |        | 240.000.000 |        | 240.000.000 |                     |                |
| Tersedianya Layanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah                                                     | Jumlah Layanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah<br>(Layanan)                                            | 3.000                     | 12                              | 150.000.000 | 12     | 180.000.000 | 12     | 210.000.000 | 12     | 240.000.000 | 12     | 240.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0010 -<br>Penelitian dan Verifikasi<br>Data Pelaporan Pajak<br>Daerah                     |                                                                                                       |                           |                                 | 150.000.000 |        | 180.000.000 |        | 210.000.000 |        | 240.000.000 |        | 240.000.000 |                     |                |
| Terlaksananya Penelitian<br>dan Verifikasi Data<br>Pelaporan Pajak Daerah                              | Jumlah Data Pelaporan<br>Pajak Daerah yang Telah<br>Dilakukan Penelitian dan<br>Verifikasi (Dokumen)  | 52                        | 24                              | 150.000.000 | 24     | 180.000.000 | 24     | 210.000.000 | 24     | 240.000.000 | 24     | 240.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0011 -<br>Penagihan Pajak Daerah                                                          |                                                                                                       |                           |                                 | 250.000.000 |        | 280.000.000 |        | 310.000.000 |        | 340.000.000 |        | 340.000.000 |                     |                |
| Terlaksananya Penagihan<br>Pajak Daerah                                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penagihan<br>Pajak Daerah (Dokumen)                               | 12                        | 24                              | 250.000.000 | 24     | 280.000.000 | 24     | 310.000.000 | 24     | 340.000.000 | 24     | 340.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0012 -<br>Penyelesaian Keberatan<br>Pajak Daerah                                          |                                                                                                       |                           |                                 | 150.000.000 |        | 180.000.000 |        | 210.000.000 |        | 240.000.000 |        | 240.000.000 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Penyelesaian Keberatan<br>Pajak Daerah                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelesaian Keberatan<br>Pajak Daerah (Dokumen)                              | 12                        | 12                              | 150.000.000 | 12     | 180.000.000 | 12     | 210.000.000 | 12     | 240.000.000 | 12     | 240.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0013 -<br>Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Pajak Daerah                     |                                                                                                       |                           |                                 | 300.000.000 |        | 330.000.000 |        | 360.000.000 |        | 390.000.000 |        | 390.000.000 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pemeriksaan serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak Daerah                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah (Dokumen) | 12                        | 12                              | 300.000.000 | 12     | 330.000.000 | 12     | 360.000.000 | 12     | 390.000.000 | 12     | 390.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0014 -<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Pengelolaan<br>Pajak Daerah dan Retribusi<br>Daerah |                                                                                                       |                           |                                 | 200.000.000 |        | 240.000.000 |        | 260.000.000 |        | 290.000.000 |        | 290.000.000 |                     |                |
| Terlaksananya Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah (Laporan)      | 12                        | 24                              | 200.000.000 | 24     | 240.000.000 | 24     | 260.000.000 | 24     | 290.000.000 | 24     | 290.000.000 |                     |                |
| 5.02.04.2.01.0015 -<br>Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah                                  |                                                                                                       |                           |                                 | 150.000.000 |        | 180.000.000 |        | 210.000.000 |        | 240.000.000 |        | 240.000.000 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME<br>/ OUTPUT                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETER-<br>ANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                               |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |                 |
|                                                                            |                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |                 |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)            |
| Terlaksananya Upaya<br>Mengubah Transaksi Tunai<br>Menjadi Non Tunai       | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah<br>(Laporan) | 12                        | 4                               | 150.000.000 | 4      | 180.000.000 | 4      | 210.000.000 | 4      | 240.000.000 | 4      | 240.000.000 |                     |                 |

## 4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025 - 2030**

| NO   | PROGRAM PRIORITAS                                |                                                                | OUTCOME                                                | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                        | KET. |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01) | (02)                                             |                                                                | (03)                                                   | (04)                                                                                                                                          | (05) |
| 01   | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |                                                                | Meningkatnya Realisasi PAD dan Pertumbuhan PAD Tahunan |                                                                                                                                               |      |
|      | 01                                               | Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah                  |                                                        | 5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                      |      |
|      | 02                                               | Optimalisasi retribusi daerah                                  |                                                        | 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    |      |
|      | 03                                               | Pemutakhiran data objek dan subjek pajak/ Validasi Data PBB-P2 |                                                        | 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |      |
|      |                                                  |                                                                |                                                        | 5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |      |

| NO | PROGRAM PRIORITAS                                                  |                                                     | OUTCOME                                                                                                           | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                     | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah                                           |      |
| 02 | Program Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Pendapatan Daerah      |                                                     | Meningkatnya layanan pajak/retribusi terdigitalisasi dan Meningkatnya wajib pajak yang menggunakan sistem digital |                                                                                            |      |
|    | 01                                                                 | Pengembangan sistem e-Pajak dan e-Retribusi         |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah        |      |
|    | 02                                                                 | Penerapan kanal pembayaran digital (QRIS, VA, dsb.) |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah               |      |
|    | 03                                                                 | Integrasi database pendapatan antar-OPD             |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |      |
| 03 | Program Peningkatan Kepatuhan dan Pembinaan Wajib Pajak            |                                                     | Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Aktif dan tidak Aktif                                                          |                                                                                            |      |
|    | 01                                                                 | Sosialisasi dan edukasi pajak daerah                |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                   |      |
|    | 02                                                                 | Pendampingan wajib pajak potensial                  |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |      |
|    | 03                                                                 | Pembentukan pusat layanan konsultasi pajak          |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  |      |
| 04 | Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak Daerah                |                                                     | Menurunnya Nilai Piutang Pajak Daerah dan Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak                                      |                                                                                            |      |
|    | 01                                                                 | Pemeriksaan dan audit pajak daerah dan Uji Petik    |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |      |
|    | 02                                                                 | Penagihan tunggakan pajak                           |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah                                                 |      |
|    | 03                                                                 | Koordinasi penegakan hukum dengan instansi terkait  |                                                                                                                   | 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |      |
| 05 | Program Penguatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pendapatan Daerah |                                                     | Meningkatnya Jumlah Pegawai bersertifikat kompetensi Pajak Daerah dan Meningkatnya Nilai Indeks Kinerja Aparatur  |                                                                                            |      |
|    | 01                                                                 | Pelatihan dan sertifikasi pegawai                   |                                                                                                                   | 0.00.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            |      |
|    | 02                                                                 | Penerapan sistem kinerja berbasis hasil             |                                                                                                                   | 0.00.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                      |      |
|    | 03                                                                 | Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur             |                                                                                                                   | 0.00.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                      |      |

| NO | PROGRAM PRIORITAS |                                                                   | OUTCOME                                                                                                  | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                             | KET. |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 06 |                   | Program Penguatan Kerja Sama dan Kolaborasi Pendapatan Daerah     | Meningkatnya Kontribusi PAD dari hasil Kolaborasi dan Meningkatnya Kerjasama Aktif bersama Pihak lainnya |                                                                                                    |      |
|    | 01                | Integrasi data dengan BPN, Disdukcapil, dan instansi lain         |                                                                                                          | 5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |      |
|    | 02                | Kerja sama pemungutan dengan pihak ketiga (bank/platform digital) |                                                                                                          | 5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                    |      |
|    | 03                | Forum koordinasi PAD antar-daerah                                 |                                                                                                          | 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |      |

#### **4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Baubau. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah

berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Target indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran perangkat daerah akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Target Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran**  
**Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2030**  
**melalui IKU Perangkat Daerah**

| No  | Indikator                                 | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |              |              |              |               |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
|     |                                           |                                         | Tahun 2025                  | Tahun 2026   | Tahun 2027   | Tahun 2028   | Tahun 2029    | Tahun 2030    |                                          |
| (1) | (2)                                       | (3)                                     | (4)                         | (5)          | (6)          | (7)          | (8)           | (9)           | (10)                                     |
| 1.  | Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB          | 0,30%                                   | 0,33%                       | 0,36%        | 0,39%        | 0,42%        | 0,46%         | 0,50%         | 0,50%                                    |
| 2.  | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah | 102,95%                                 | 86,00%                      | 88,00%       | 90,00%       | 92,00%       | 94,00%        | 95,00%        | 95,00%                                   |
| 3.  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah              | B<br>(72,56)                            | B<br>(74,00)                | B<br>(75,00) | B<br>(77,00) | B<br>(78,00) | BB<br>(80,00) | BB<br>(82,00) | BB<br>(82,00)                            |

#### 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pengukuran kinerja daerah dan perangkat daerah pada periode Renstra. IKK menggambarkan hasil

(outcome) yang menunjukkan sejauh mana program/kegiatan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau**  
**Tahun 2025-2030**

| NO        | INDIKATOR                                                                 | STA<br>TUS | SAT<br>UAN   | BASE<br>LINE<br>TAHU<br>N<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|           |                                                                           |            |              |                                   | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (01)      | (02)                                                                      | (03)       | (04)         | (05)                              | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12) |
| <b>A</b>  | <b>Meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah</b>             |            |              |                                   |              |       |       |       |       |       |      |
|           | Pertumbuhan PAD tahunan                                                   |            | %            | 24,20                             | 3,02         | 4,04  | 4,78  | 5,52  | 5,48  | 6,10  |      |
|           | Persentase Pertumbuhan Obyek Pajak yang teridentifikasi                   |            | %            | 5,36                              | 1,42         | 2,82  | 3,01  | 3,19  | 3,35  | 3,49  |      |
| <b>B.</b> | <b>Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah</b>     |            |              |                                   |              |       |       |       |       |       |      |
|           | Rasio kepatuhan wajib pajak                                               |            | %            | 76,5                              | 77,00        | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 |      |
|           | Persentase piutang pajak daerah yang tertagih                             |            | %            | 8,29                              | 9,00         | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |      |
|           | Persentase layanan pajak/retribusi yang terdigitalisasi                   |            | %            | 47,00                             | 50,00        | 53,00 | 59,00 | 65,00 | 71,00 | 76,00 |      |
| <b>C.</b> | <b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah</b> |            |              |                                   |              |       |       |       |       |       |      |
|           | Waktu rata-rata pelayanan pajak/retribusi                                 |            | Menit        | 7                                 | 7            | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     |      |
| <b>D.</b> | <b>Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM Bapenda</b>                 |            |              |                                   |              |       |       |       |       |       |      |
|           | Persentase pegawai yang memiliki sertifikasi teknis pajak/retribusi       |            | %            | 8,33                              | 12,50        | 16,67 | 20,83 | 25,00 | 29,17 | 29,17 |      |
|           | Indeks profesionalisme aparatur Bapenda                                   |            | Skor (0–100) | 75                                | 77           | 78    | 79    | 80    | 81    | 82    |      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan lingkup Badan Pendapatan Daerah, sebagai dasar dalam pelaksanaan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintah bidang keuangan pada bidang pengelolaan pendapatan daerah. Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap pemangku kepentingan, khususnya dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Baubau.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau 2025-2030 ini. Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

Baubau, 05 Agustus 2025

**Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah**  
**Kota Baubau**



**Drs. MUSRIFI, M.Si.**  
Pembina Tk. I

NIP. 19731206 199302 1 001